



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas
Telepon / Fax : (0733) 4540094 Kode Pos 31661
E-mail : inspektorat@musirawaskab.go.id Website : www.inspektorat.musirawaskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.

Muara Beliti, 30 Maret 2026



Pt. Inspektur Daerah
Kabupaten Musi Rawas,

Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197308131998031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan jawaban atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas 2025-2029, dengan mengusung visi **"Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat Berkelanjutan (Mantabkan)"**. Dengan semangat akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien dan profesional diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di tahun 2025.

Pelaksanaan RPJMD 2025-2029 di tahun pertama ini dengan capaian kinerja yang telah ditargetkan mencapai rata-rata 197,40% dengan kategori **sangat tinggi** dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya hasil analisis dan evaluasi dalam laporan ini dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan terhadap penyusunan laporan kinerja ini, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Muara Beliti, 30 Maret 2026

BUPATI MUSI RAWAS



Ratna Machmud
RATNA MACHMUD

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025

Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, di mana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam 5 tahun kedepan termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah ***“MUSI RAWAS MAJU MANDIRI BERMARTABAT BERKELANJUTAN (MANTABKAN)”*** dengan 4 Misi, 6 Tujuan, 19 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Sasaran.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan telah melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja tahun 2025 karena terjadi transisi karena Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ke Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun pertama (2025) periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

❖ **Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator sasaran**

- Rata-rata capaian dari 2 indikator sasaran pada misi I adalah 101,92 atau dengan kategori sangat tinggi.

❖ **Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran strategis dan 3 indikator sasaran**

- Rata-rata capaian dari 3 indikator sasaran pada misi II adalah 100,60 atau dengan kategori sangat tinggi.

❖ **Misi III terdapat 2 tujuan, 5 sasaran strategis dan 7 indikator sasaran**

- Rata-rata capaian dari 7 indikator sasaran pada misi III adalah 99,10 atau dengan kategori sangat tinggi

❖ **Misi IV terdapat 2 tujuan, 10 sasaran strategis dan 12 indikator sasaran**

- Rata-rata capaian dari 12 indikator sasaran pada misi IV adalah 294,83 atau dengan kategori sangat tinggi

Secara rinci dari 4 Misi, 6 Tujuan, 19 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Sasaran hanya terdapat 1 (satu) indikator yang capaian kinerja hanya 67,50% yaitu Indeks Ketahanan Daerah dari target 0,4 terealisasi hanya 0,27 (*Sumber: BNPB*). Selanjutnya ada 1 (satu) indikator yang capaian kinerja mencapai 2.022% yaitu Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target 2% terealisasi 40,44% atau secara nominal ada peningkatan realisasi PAD dari tahun 2024 sebesar Rp 125.882.236.273,80 menjadi Rp 176.790.725.559,50 di tahun 2025 (*Sumber: BPPRD Kab. Mura*).

Selain sasaran strategis dan indikator sasaran yang telah ditetapkan ada juga indikator kinerja utama yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas di 2025. Capaian indikator kinerja utama tahun 2025 tertera pada tabel dibawah ini

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	4,59	86,60	BPS Kab. Mura
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,35	71,92	100,80	BPS Kab. Mura
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,5	12,67	90,00	BPS Kab. Mura
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,14	76,88	108,07	DLH Kab. Mura
5	Pendapatan Per Kapita	Juta (Rupiah)	62,87	65,5	104,18	BPS Kab. Mura
6	Gini Ratio	Angka	0,256	0,209	118,36	BPS Kab. Mura
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,24	75,77*	99,38	KemenpanRB

*) Data tahun 2024 (LHE 2025 belum terbit)

Dari tabel diatas capaian kinerja utama rata-rata 101,06 atau kategori sangat baik. Pertumbuhan ekonomi dengan capaian 86,60% yang paling rendah dari indikator-indikator yang lain. Namun demikian untuk indikator yang $\geq 100\%$ perlu terus dijaga bahwa hal ini menunjukkan kinerja tersebut telah tercapai dengan baik.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas didukung oleh kolaborasi dan sinergisitas antar perangkat daerah serta bimbingan kementerian dan lembaga pemerintah terkait dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini juga didukung oleh **127** program yang tersebar di seluruh perangkat daerah dengan total pagu anggaran pada APBDP 2025 sebesar Rp 2.260.695.659.553,48 dengan realisasi Rp 1.861.995.911.246,17 atau 95,72% *unaudited* (Sumber: BPKAD Kab. Mura)

Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerjanya diatas $>100\%$ dengan kategori **Sangat Tinggi**. Artinya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tetap konsisten menjalankan program-program unggulan menuju. **MUSI RAWAS MAJU MANDIRI BERMARTABAT BERKELANJUTAN (MANTABKAN)**

Muara Beliti, 30 Maret 2026
BUPATI MUSI RAWAS,

RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB	I	PENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Gambaran Umum Daerah.....	2
	B.1	Kondisi Geografis	2
	B.2	Sumber Daya Alam	4
	B.3	Topografi	5
	B.4	Kondisi Demografi	5
	C.	Capaian Kinerja Makro.....	7
	C.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	7
	C.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	8
	C.3	Angka Kemiskinan.....	10
	C.4	Angka Pengangguran.....	11
	C.5	Gini Ratio.....	12
	D.	Kondisi Pemerintahan	13
	E.	SDM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	17
	F.	Isu-isu Strategis	20
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA	21
	A.	Rencana Strategis	21
	A.1	Visi dan Misi	22
	A.2	Tujuan dan Sasaran	25
	B.	Perjanjian Kinerja	28
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	A.	Capaian Kinerja	33
	B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
	C.	Capaian Kinerja Utama (IKU).....	100
BAB	IV	PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Musi Rawas.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	19
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.....	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	34
Tabel 3.3	Target Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	37
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	38
Tabel 3.5	Target Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.....	41
Tabel 3.6	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan.....	43
Tabel 3.7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	45
Tabel 3.8	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan	46
Tabel 3.9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Se-Sumatera Selatan.....	47
Tabel 3.10	Harapan Lama Sekolah (HLS) Se-Sumatera Selatan.....	49
Tabel 3.11	APK dan APM Jenjang Pendidikan Kab. Musi Rawas.....	50
Tabel 3.12	Data Capaian Program Pakaian Gratis Tahun 2024-2025 dan Rencana Tahun 2026.....	52
Tabel 3.13	Data Guru Sertifikasi Kab. Musi Rawas Tahun 2025.....	52
Tabel 3.14	Data Fasilitas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	53
Tabel 3.15	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.....	54
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022-2025.	55
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Jembatan Kab. Musi Rawas Tahun 2022-2025....	56
Tabel 3.18	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar, Perumahan dan Sumber Daya Air.....	58
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sanitasi, Air Minum dan rasio Elektrifikasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 – 2025.....	59
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 2025.....	60
Tabel 3.21	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	62
Tabel 3.22	Target Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	64

	Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	
Tabel 3.23	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang.....	66
Tabel 3.24	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana.....	68
Tabel 3.25	Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.....	68
Tabel 3.26	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.....	71
Tabel 3.27	Capaian Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Musi Rawas.....	72
Tabel 3.28	Capaian Produksi Daging dan Telur Kabupaten Musi Rawas.....	73
Tabel 3.29	Capaian Produksi Hasil Perikanan.....	74
Tabel 3.30	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan.....	76
Tabel 3.31	Prasarana Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.....	79
Tabel 3.32	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Musi Rawas.....	80
Tabel 3.33	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.....	83
Tabel 3.34	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	85
Tabel 3.35	Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas.....	86
Tabel 3.36	Penjelasan Peningkatan PAD.....	87
Tabel 3.37	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.....	89
Tabel 3.38	Pendapatan Per Kapita Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	90
Tabel 3.39	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat.....	91
Tabel 3.40	Gini Rasio Se-Provinsi Sumatera Selatan 2025.....	92
Tabel 3.41	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Keluarga.....	94
Tabel 3.42	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan.....	96
Tabel 3.43	Realisasi Indikator Score PPH Ketersedian dan Konsumsi.....	97
Tabel 3.44	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Daerah dan Stabilitas Demokrasi.....	99
Tabel 3.45	Angka kriminalitas dan Jumlah Kasus Kejahatan Kabupaten Musi Rawas.....	99
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	100
Tabel 3.47	Alasan Pendukung Program Capaian Kinerja Sasaran.....	102

Tabel 3.48	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 *).	112
Tabel 3.49	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Realisasi Anggaran.	113
Tabel 3.50	Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Musi Rawas	3
------------	---------------------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	6
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	7
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	8
Grafik 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	8
Grafik 1.5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	9
Grafik 1.6	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas.....	10
Grafik 1.7	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas	11
Grafik 1.8	Angka Pengangguran Kabupaten Musi Rawas	12
Grafik 1.9	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas.....	13
Grafik 1.10	ASN Kabupaten Musi Rawas Tahun 202.....	18
Grafik 1.11	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 202.....	19
Grafik 3.1	Pencapaian Kinerja RPJMD Kab. Musi Rawas Tahun 2025.....	36
Grafik 3.2	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Rawas.....	40
Grafik 3.3	Indeks SPBE Kabupaten Musi Rawas.....	42
Grafik 3.4	Usia Harapan Hidup (UHH).....	44
Grafik 3.5	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas.....	47
Grafik 3.6	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Musi Rawas.....	48
Grafik 3.7	Jumlah Siswa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.....	51
Grafik 3.8	Capaian Kinerja Jalan Kab. Musi Rawas Tahun 2021-2025 (KM)..	55
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022-2025.....	59
Grafik 3.10	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018- 2025.....	62
Grafik 3.11	Perbandingan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (Dalam Persen)	70
Grafik 3.12	Produksi Komoditas Perkebunan Kab. Musi Rawas 2024-2025 (Ton).....	74
Grafik 3.13	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Musi Rawas.....	77
Grafik 3.14	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Musi Rawas...	78
Grafik 3.15	Peningkatan Investasi Kabupaten Musi Rawas (Milyar).....	81
Grafik 3.16	Capaian Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Musi Rawas.....	81
Grafik 3.17	Rasio Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman.....	83
Grafik 3.18	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Musi Rawas.....	84
Grafik 3.19	Jumlah Rumah Makan/Restoran Kabupaten Musi Rawas.....	84
Grafik 3.20	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Musi Rawas.....	89
Grafik 3.21	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Musi Rawas.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi yang memiliki integritas dan budaya melayani menjadi harapan masyarakat dengan mewujudkan program-program strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Wujud nyata dari program-program tersebut diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama program pengentasan kemiskinan.

Birokrasi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program strategis tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap outcome dan penggunaan anggaran. Salah bentuk pertanggungjawaban pelayanan kepada masyarakat tersebut diwujudkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan tetap mengedepankan azas akuntabel dan transparansi.

Wujud pertanggungjawaban perangkat daerah atau instansi pemerintah yaitu menyampaikan laporan kinerja yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja dalam perjanjian kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Disamping itu laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas

terhadap kewenangan tugas dan fungsi instansi dalam penggunaan anggaran tahun berjalan.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh bupati setiap awal tahun anggaran.

B. Gambaran Umum Daerah

B.1 Kondisi Geografis

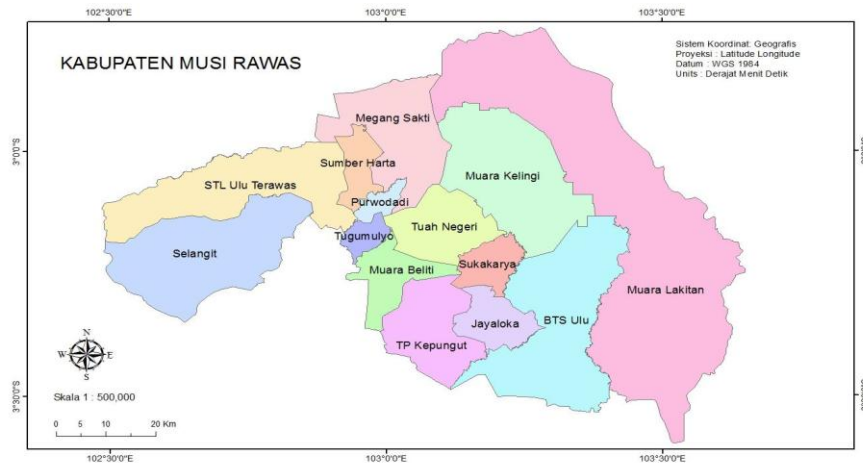
Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi $102^{\circ}29'22''$ – $103^{\circ}36'52''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}45'26''$ – $3^{\circ}28'58''$ Lintang Selatan dan merupakan kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 635.717.15 Ha. Adapun batas–batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Rawas memiliki letak yang sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, serta jalan lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang (ibukota Provinsi Sumatera Selatan) dengan Provinsi Bengkulu.

Kondisi geografis dan batas administratif tersebut, menunjukkan bahwa secara sosial – ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk

tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan, terutama dari hasil pertanian dan perkebunan.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas berada pada ketinggian 129 mdpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas.

Di wilayah Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar antara lain: Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Musi. Sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis merawan, sungkai, merbau, kulim, rotan dan jenis tumbuhan komersil lainnya. Sedangkan jenis satwa seperti harimau, gajah, monyet, rusa, kijang, ayam hutan dan jenis satwa liar lainnya dan merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan merupakan satwa yang dilindungi.

Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 kecamatan, 186 desa dan 13 kelurahan beserta luar wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Musi Rawas

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas ¹ <i>Total Area</i> ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Suku Tengah Lakitan Ulu	Terawas	596,92
Selangit	Selangit	717,34
Sumber Harta	Sumber Harta	103,78
Tugumulyo	Srikaton	67,71
Purwodadi	Purwodadi	63,26
Muara Beliti	Pasar Muara Beliti	175,63
Tiang Pumpung Kepungut	Muara Kati Baru I	326,42
Jayaloka	Mangun Tunggal	160,46
Suka Karya	Ciptodadi	121,53
Muara Kelingi	Muara Kelingi	645,82
Bulang Tengah Suku Ulu	Mangun Jaya	751,54
Tuah Negeri	Lubuk Rumbai	263,45
Muara Lakitan	Muara Lakitan	1 963,54
Megang Sakti	Megang Sakti I	399,78
Musi Rawas	Muara Beliti	6 357,17

Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026

B.2 Sumber Daya Alam

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi kekayaan alam yang tinggi. Potensi terbesar yang ada di Kabupaten Musi Rawas adalah potensi perkebunan dan potensi pertanian. Selain itu juga terdapat juga minyak bumi, batu bara dan bahan galian golongan C yang potensial.

Dari luas Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 66,5 derajat dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 derajat tanah liat. Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi. Sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan

berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas.

B.3 Topografi

Secara umum, kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi wilayah yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 125–200 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0–2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0–15%, yang merupakan daerah potensial untuk pertanian. Selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari utara sampai selatan. Khususnya di bagian barat daerah ini yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 provinsi.

B.4 Kondisi Demografi

Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin besar perhatian yang diperlukan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebesar 67jiwa/km². Kecamatan Tugumulyo memiliki kepadatan tertinggi sebesar 735 jiwa/ km² (*Sumber: Musi Rawas dalam angka 2024*).

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025 sebanyak 429.670 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 219.396 jiwa dan perempuan sebanyak 210.274 jiwa (*Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2025*) secara rinci tersaji pada tabel 1.2 berikut ini.

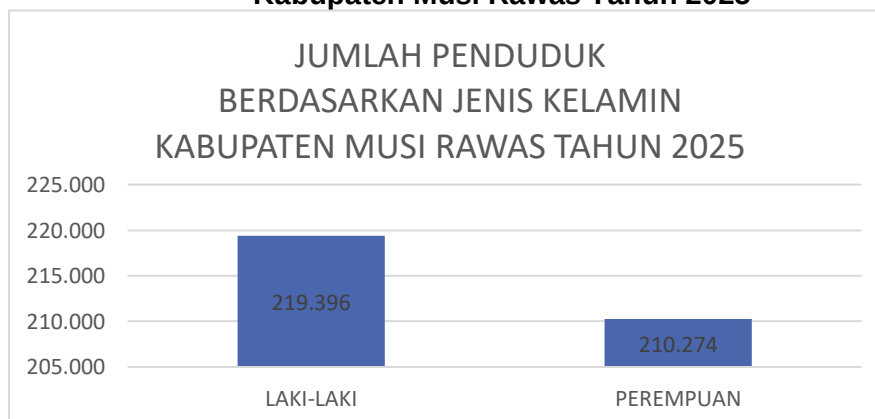
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tugumulyo	25.193	24.733	49.926
2.	Muara Lakitan	23.117	21. 841	44.958
3.	Muara Kelingi	23.962	22.916	46.878
4.	Jayaloka	8.641	8.312	16.953
5.	Muara Beliti	14.832	14.460	29.292
6.	STL. Ulu Terawas	17.737	17.002	34.739
7.	Selangit	10.474	10.030	20.504
8.	Megang Sakti	30.467	28.933	59.400
9.	Purwodadi	8.415	8.310	16.725
10.	BTS Ulu	16.780	15.895	32.675
11.	Tiang Pumpung Kepungut	6.677	6.450	13.127
12.	Sumber Harta	10.104	9.743	19.847
13.	Tuah Negeri	14.748	13.888	28.636
14.	Suka Karya	8.249	7.761	16.000
Jumlah		219.396	210.274	429.670

Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2026

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk laki-laki mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini akan terlihat jelas grafik dibawah ini.

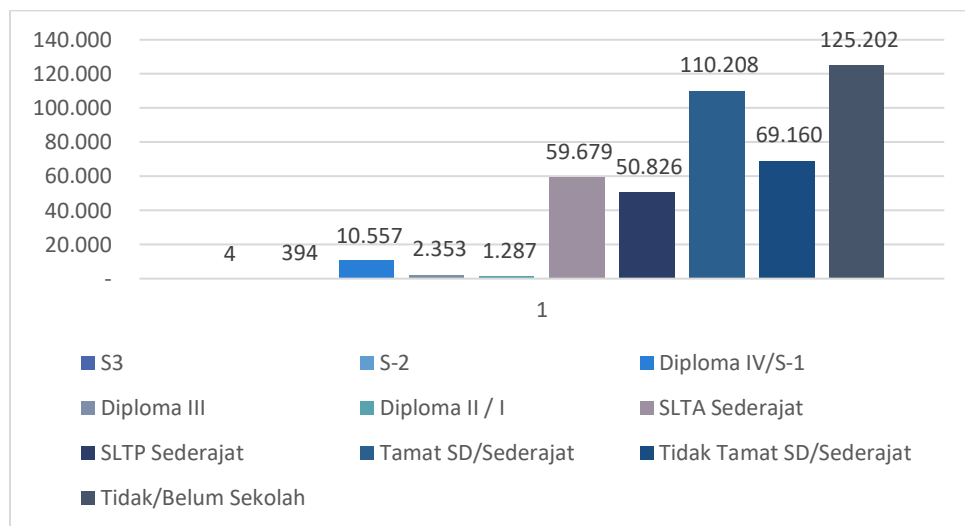
Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025



Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2026

Kondisi penduduk Kabupaten Musi Rawas dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar didominasi oleh tidak/belum sekolah dengan jumlah 125.202 orang atau 29,14%, sedangkan tingkat pendidikan strata III berjumlah 4 orang. Secara rinci data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2026

C. Capaian Kinerja Makro

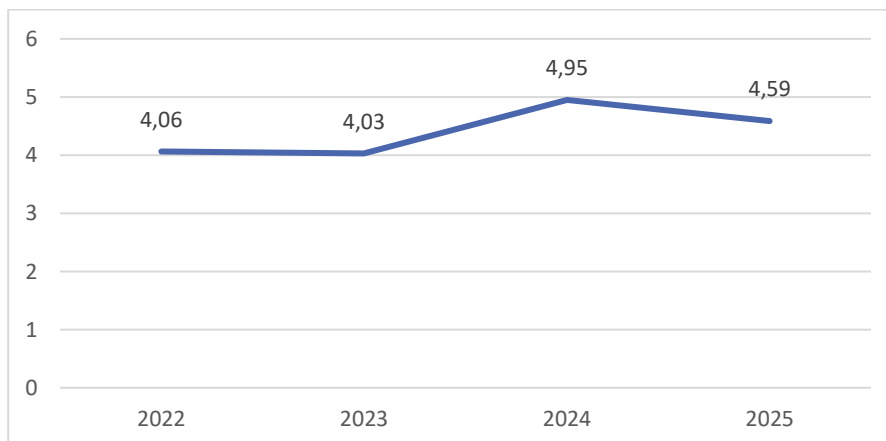
C.1 Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 4,06% di tahun 2022 menjadi 4,59% di tahun 2025 (Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026). Namun demikian mengalami penurunan di tahun 2025 dibanding tahun tahun

2024 sebesar 0,36%. Secara rinci pertumbuhan ekonomi dalam dilihat pada grafik di bawah ini

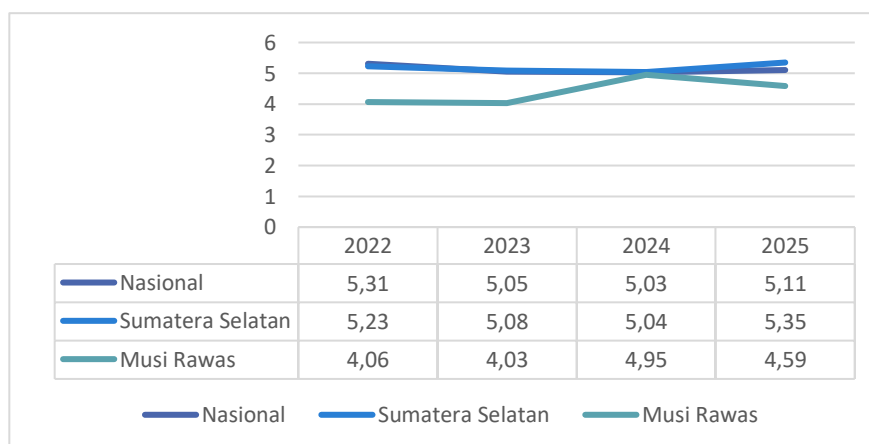
Grafik 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025



Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diatas rata-rata Provinsi Sumatera Selatan maupun rata-rata nasional. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan Dan Kabupaten Musi Rawas



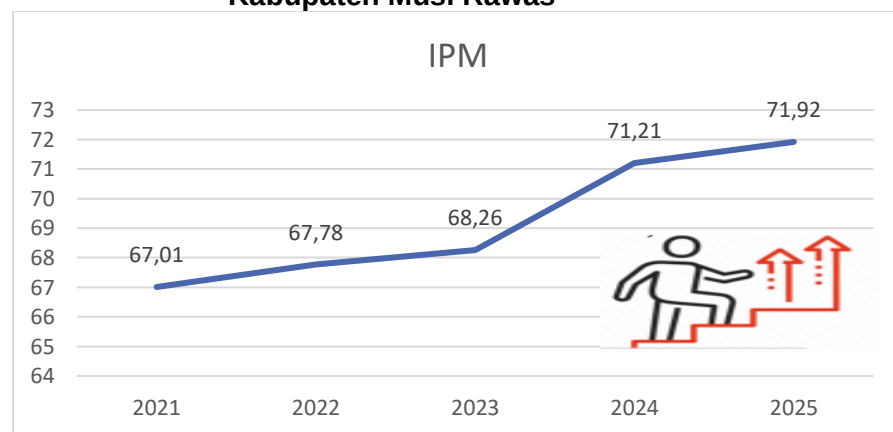
Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2026

C. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan akhir dari pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah dapat diukur dengan capaian indeks pembangunan manusianya. Menurut UNDP (*United Development Programme*) ada beberapa dimensi untuk melihat keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan capaian dimensi umur Panjang dan hidup sehat atau indeks Kesehatan, dimensi Pengetahuan atau Indeks Pendidikan, dan dimensi pendapatan perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 adalah 71,92, artinya ada peningkatan sebesar 0,71, (*Sumber: BPS Musi Rawas, Tahun 2026*). Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rinci capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas disajikan pada grafik di bawah ini.

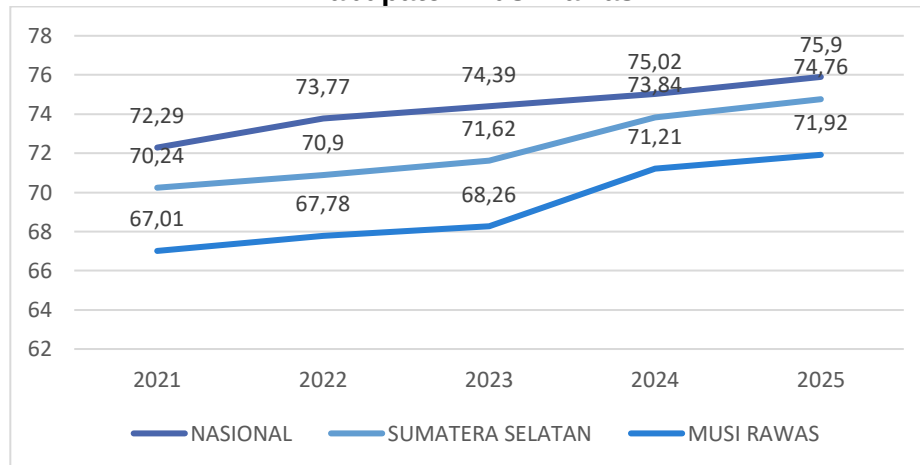
Grafik 1.5
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2026

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Karena capaian provinsi dan nasional di atas 74. Secara rinci capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.6
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2026

Ada beberapa aspek untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (AHS) dan Angka Pengeluaran Perkapita. AHH Kabupaten Musi Rawas ditahun 2025 sebesar 74,45 tahun dan AHS sebesar 12,43 tahun dan rata-rata angka pengeluaran per kapita sebesar Rp. 11.410.000 per tahun

C.3 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 sebesar 12,67% menurun dari tahun sebelumnya yaitu berkisar 13,44% atau mengalami penurunan sebesar 0,77%. Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas ditampilkan secara rinci pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.7
Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas , 2026

Dari persentase angka kemiskinan sebesar 12,67% artinya masih ada 27.335 penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas yang perlu mendapatkan perhatian. Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih diatas rata-rata provinsi dan nasional yaitu 8,25%.(Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025)

C.4 Angka Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran di Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 sebesar 1,74%. Mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,94%. Secara rinci angka pengangguran di Kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.8
Angka Pengangguran Kabupaten Musi Rawas



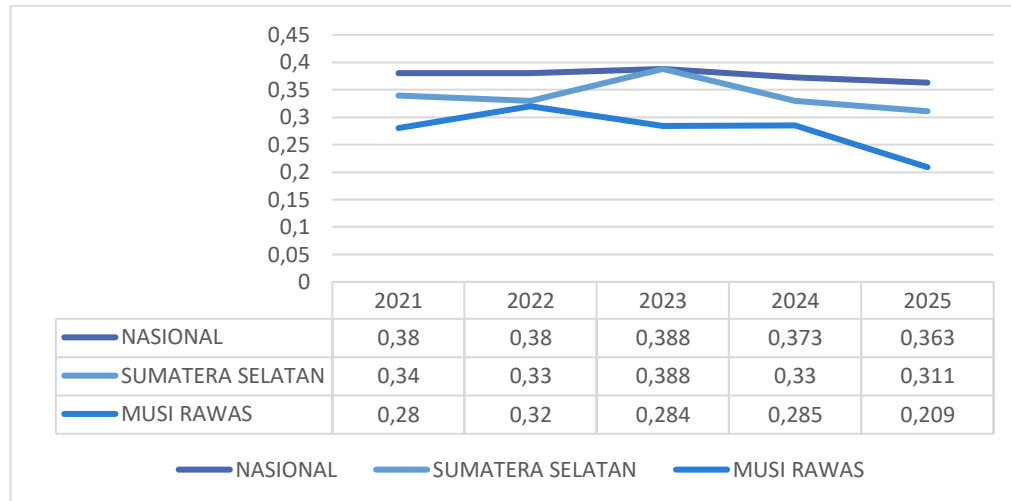
Sumber: BPS KAB. Musi Rawas, 2026

Angka pengangguran Kabupaten Musi Rawas cenderung rendah jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang masih 3,69% dan rata-rata nasional yang masih berada pada angka 4,74%. Namun demikian hal ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, artinya walaupun angka pengangguran rendah namun pendapatan atau upah yang diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok.

C.5 Gini Ratio

Gini ratio atau Indeks Gini adalah ukuran tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan disuatu wilayah atau populasi. Rentan nilai Gini Ratio yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi gini ratio maka pendapatan masyarakat semakin timpang atau tidak merata. Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 adalah 0,209 yang artinya cenderung merata. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas dengan provinsi dan nasional secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 1.9
Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas



Sumber : BPS Kab. Musi Rawas 2026

D. Kondisi Pemerintahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan perangkat daerah dengan kewenangannya. Maka dari itu dilakukan penataan kembali perangkat daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pasal 2, susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan dan jembatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tipe A menyelenggarakan sebagian bidang pekerjaan umum sub urusan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistika serta urusan pemerintahan bidang persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
22. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;

24. Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan restribusi daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Muara Beliti Tipe A;
 2. Kecamatan Muara Lakitan Tipe A;
 3. Kecamatan Muara Kelingi Tipe A;
 4. Kecamatan Sumber Harta Tipe A;
 5. Kecamatan Suka Karya Tipe A;
 6. Kecamatan Tugumulyo Tipe A;

7. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tipe A;
 8. Kecamatan Jayaloka Tipe A;
 9. Kecamatan Purwodadi Tipe A;
 10. Kecamatan Tuah Negeri Tipe A;
 11. Kecamatan STL Ulu Terawas Tipe A;
 12. Kecamatan Selangit Tipe A;
 13. Kecamatan Megang Sakti Tipe A;
 14. Kecamatan BTS Ulu Tipe A.
- g. Kelurahan terdiri dari:
1. Kelurahan P Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
 2. Kelurahan O Mangun Harjo Kecamatan Purwodadi;
 3. Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti;
 4. Kelurahan Terawas Kecamatan STL. Ulu Terawas;
 5. Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit;
 6. Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumuyo;
 7. Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta;
 8. Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi;
 9. Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka;
 10. Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti;
 11. Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti;
 12. Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan; dan
 13. Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu.

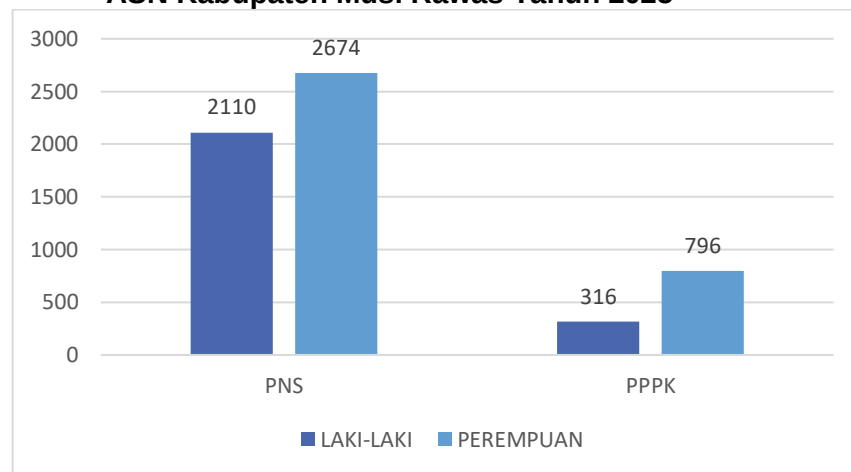
Selain perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan juga terdapat UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang bertugas mendukung pelaksanaan teknis kegiatan perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

E. SDM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Sumber daya manusia pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Pegawai

Negeri Sipil di tahun 2025 berjumlah 4.784 orang terdiri dari laki-laki 2.110 orang atau 44,10% dan perempuan 2.674 orang atau 55,89%. Sedangkan PPPK berjumlah 1.112 orang dengan rincian laki-laki 316 orang dan 796 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah saat baik. Secara rinci jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 ditunjukkan pada grafik dibawah ini:

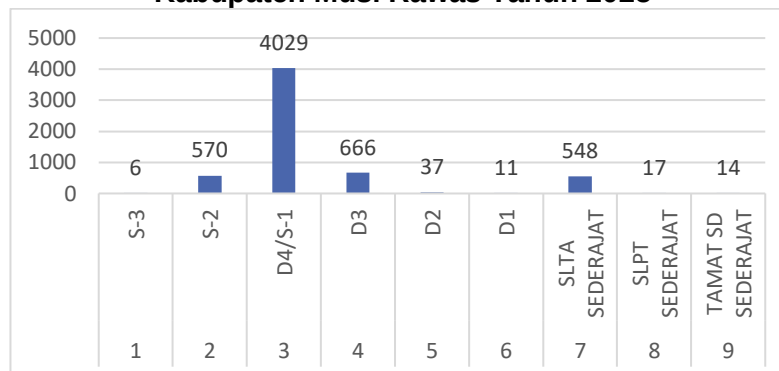
Grafik 1.10
ASN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025



Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2026

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh jenjang Pendidikan S1 berjumlah 3,117 orang atau 52,86% dan jenjang Pendidikan D3 yang berjumlah 507 orang atau 8,59%. Hal ini menunjukkan jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara sudah baik. Secara rinci jumlah Pendidikan berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.11
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025



Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2026

ASN Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh jabatan fungsional yang berjumlah 4.158 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 1.058 orang. Sementara jumlah PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama (JPT) sebanyak 28 orang, Jabatan Administrator berjumlah 172 orang, Jabatan Pengawas 480 orang. Secara rinci Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	Jabatan Tinggi Pratama	28	0,48
2	Administrator	172	2,91
3	Pengawas	480	8,14
4	Fungsional	4158	70,52
5	Pelaksana	1058	17,95
Total		5.896	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2026 (diolah)

F. Isu-Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Musi Rawas dapat dirumuskan dari hasil kajian terhadap kondisi Kabupaten Musi Rawas dari berbagai aspek pembangunan. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas 2025-2029. Melalui tahap ini akan diketahui apa saja yang menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat namun masih berada di bawah rata-rata provinsi;
2. Ketahanan social ekonomi masyarakat masih rendah;
3. Perlunya pembangunan berkelanjutan;
4. Kualitas lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan masih rendah;
5. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih rendah dan kesadaran masyarakat terhadap supremasi hukum masih rendah;
6. Masih adanya kesenjangan antar wilayah;
7. Kualitas tata kelola pemerintah belum optimal;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah mengingat adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Di dalam RPJMD mengedepankan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada *outcome (hasil)* yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu

juga berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan dan program kepala daerah. Dengan perencanaan strategis menjadi langkah awal bagi kepala daerah untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya secara terarah dan terencana.

Dengan memadukan pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis dan *bottom up* serta *top down* diharapkan RPJMD yang disusun sesuai dengan analisis kondisi eksternal dan internal Kabupaten Musi Rawas dengan tetap mengedepankan azas akuntabilitas. Perencanaan yang berkualitas ditunjukkan dari *outcome* yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar visi dan misi tercapai dalam kurun waktu 5 tahun menjadi tantangan yang harus terus dievaluasi dengan melihat indikator atau ukuran keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

A.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menjadi tantangan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas terpilih pada periode 2025-2029 yaitu **RATNA MACHMUD** (Bupati) dan **SUPRAYITNO** (Wakil Bupati) adalah:

MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT, BERKELANJUTAN (MANTABKAN)
--

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang:

1. **Maju** bermakna kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, perekonomiannya lebih terjamin, terlayani dengan lebih baik, lebih inovatif.
2. **Mandiri** memiliki arti Musi Rawas dapat mengelola potensi daerah sendiri secara optimal.

3. **Bermartabat** bermakna kondisi masyarakat Musi Rawas yang hidup layak, sejahtera, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan budaya.
4. **Berkelanjutan** berarti membangun daerah dengan berorientasi pada aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, social dan lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 “Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat, Berkelanjutan (MANTABKAN)”, maka diupayakan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029.

Dalam upaya penyamaan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai maka perlu dijabarkan dalam suatu kerangka berpikir perencanaan terintegrasi seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis teknologi Informasi

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis Teknologi Informasi.

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama yang religius serta keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penataan ruang serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Memperkuat Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi yang sudah dikembangkan. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera

Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan meningkat pendapatan perkapitanya

A.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

A.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029, menyelaraskan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 serta memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut

TUJUAN RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2029			
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Pemerataan infrastruktur dan	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
	Pelestarian Lihnkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Indeks Resiko Bencana (IRB)
4	Memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Miskin

A.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan dan definisi yang ingin di capai dari tujuan pembangunan seperti yang ditunjukkan maka sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2029			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Meningkatnya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)
		Meningkatnya Derajat Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
3	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar, perumahan dan sumber daya air	Indeks Infrastruktur Dasar
			Indeks Sumber Daya Air
4	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
		Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Nilai Investasi
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah
6	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
		Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Gini Rasio
		Meningkatnya kualitas Kependudukan dan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Keamanan daerah dan stabilitas demokrasi	Angka Kriminalitas

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 mengalami revisi atau perubahan yang disebabkan oleh disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan atau revisi. Secara rinci Perjanjian Kinerja perubahan atau revisi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB	76,27
2.	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis informasi	Indeks SPBE	3,11
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,20
4.	Meningkatnya derajat Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,58
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,27
5.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas antas wilayah	94,08
6.	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur dasar, perumahan dan sumber daya air	Indeks Infrastruktur Dasar	99,37
		Indeks Sumber Daya Air	49,85
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,14
		Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)	654.108,15
8.	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	92,26
9.	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,4
10.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	29,96
11.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	14,97

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	2,52
12.	Meningkatnya Nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Nilai Investasi (RP)	850 M
13.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	0,38
14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli Daerah	2
15.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	62,87
16.	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Gini Rasio	0,256
17.	Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	62,8
		Laju pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,06
18.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,84
19.	Meningkatnya keamanan daerah dan stabilitas demokrasi	Angka Kriminalitas	66,64

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tata kelola atau Manajemen pembangunan berbasis kinerja yang berfokus pada pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* atau tata Kelola pemerintahan yang baik, di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Kode
1	91 – 100	Sangat Tinggi	
2	76 – 90	Tinggi	
3	66 – 75	Sedang	
4	51 – 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan cara membandingkan antara target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA 2025

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

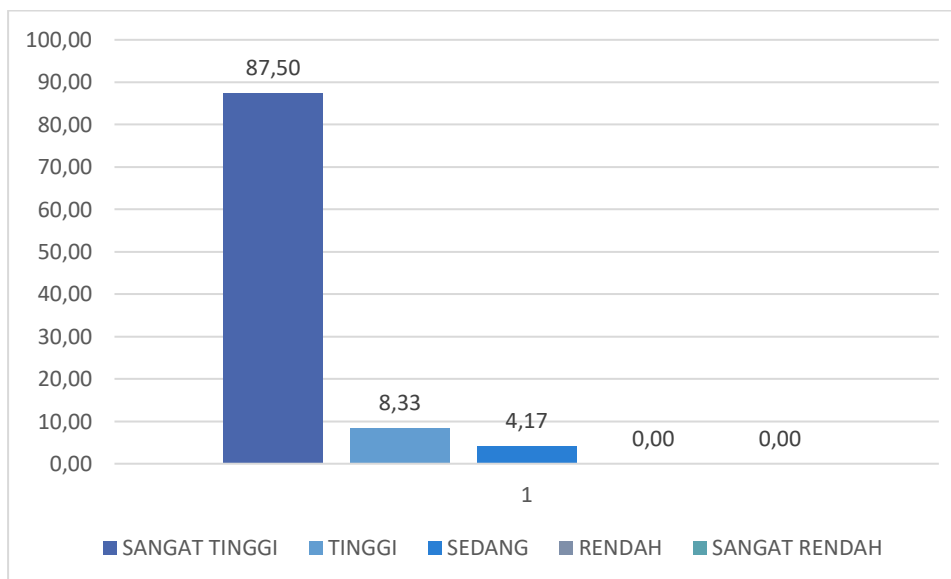
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks RB	Indeks	75,77	76,24	75,77	99,38	78,59	96,41
2	Indeks SPBE	Predikat	3,09	3,11	3,25	104,5	3,23	100,62
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,16	74,2	74,45	100,34	76,20	97,70
4	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Angka	7,57	7,58	7,61	100,4	7,64	99,61
5	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	12,23	12,27	12,43	101,3	12,40	100,24
6	Persentase konektivitas antas wilayah	Persen	93,8	94,08	82,95	88,17	96,00	86,41
7	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	99,32	99,37	93,38	93,97	99,80	93,57
8	Indeks Sumber Daya Air	Indeks	49,85	49,85	51,02	102,35	62,39	81,78
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,44	71,14	76,88	108,07	72,40	106,19
10	Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)	Ton	N/A	654.108,15	874.480	133,69	967.687,96	90,37
11	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	57,23	92,26	92,25	99,99	97,26	94,85
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,4	0,27	67,5	0,6	45
13	PDRB Sektor Pertanian (Persen)	Persen	34,43	29,96	34,93	116,59	30,51	114,49

Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
14	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen)	Persen	14,75	14,97	12,87	85,97	16,05	80,19
15	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	Persen	2,38	2,52	8,53	338,49	3,22	264,91
16	Peningkatan Nilai Investasi (RP)	Rupiah	664 M	850 M	1.307 M	153,76	1.200 Miliar	108,92
17	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	Rasio	0,38	0,38	0,32	84,21	0,41	78,05
18	Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli Daerah	Persen	-4,85	2	40,44	2.022	2	2022
19	Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	Rupiah	61,86	62,87	65,5	104,18	76,46	85,67
20	Gini Rasio	Persen	0,285	0,256	0,209	118,36	0,244	114,34
21	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	57,85	62,8	68,4	108,92	68,8	99,42
22	Laju pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	Persen	1,05	1,06	0,13	187,74	1,02	187,25
23	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,66	77,84	82,33	105,77	78,74	104,56
24	Angka Kriminalitas	Angka	68,67	66,64	58,64	112	56,48	96,18

Akuntabilitas Kinerja

Grafik 3.1 Pencapaian Kinerja RPJMD Kab. Musi Rawas 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 24 indikator kinerja bupati tahun 2025, disimpulkan bahwa 21 (dua puluh satu) atau 87,50% kategori **sangat tinggi**, 2 (dua) dengan kategori **tinggi** atau 8,33% dan 1 (satu) indikator dengan kategori **sedang** dan tidak ada indikator dengan kategori rendah atau sangat rendah.

Akuntabilitas Kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. SASARAN MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Indeks RB

Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Di tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 76,24 terealisasi 75,77*) dengan capaian kinerja 99,38% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Secara rinci capaian dari kinerja ini disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam
Tata Kelola Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks RB	75,77	76,24	75,77*	99,38	78,59	96,41
Rata-rata capaian					99,38	Sangat Tinggi	

*) nilai sementara (LHE 2024)

Indeks RB merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi indeks RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 76,24 terealisasi 75,77* (Sumber: LHE RB 2024) dengan capaian 99,38% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja Indeks RB tahun 2025 baru mencapai 96,41% dari target akhir RPJMD.

Akuntabilitas Kinerja

Secara rinci indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 dalam 2 (dua) komponen penilaian yaitu RB General dan RB Tematik dapat dilihat pada tabel dibawah in:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi RB Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas tahun 2025*

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	65,41
B	RB Tematik	20	9,75
C	Indeks RB	120	75,16
			(BB)

Sumber: LHE 2024, KemenPANRB, 2025

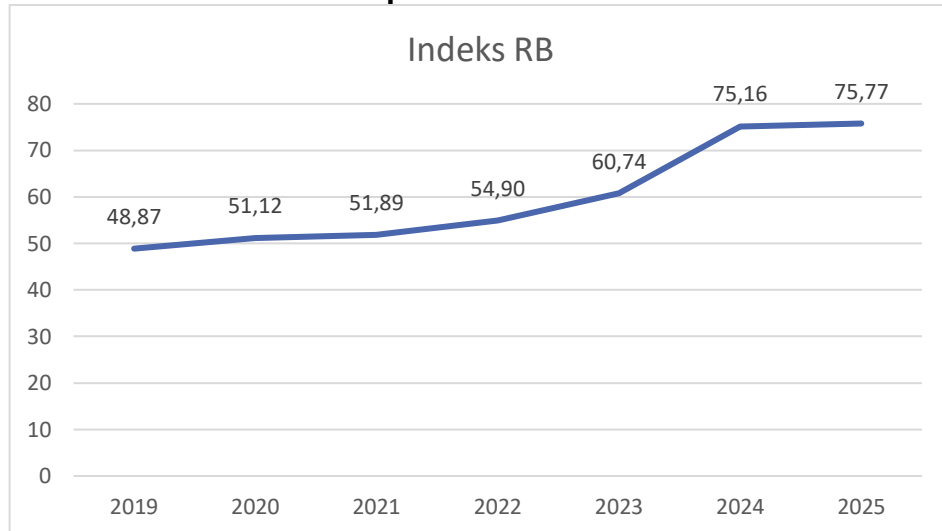
Keberhasilan ini bukan hanya didukung oleh komitmen dari *stakeholders* dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi terutama dengan memedomani dan menjalankan semua tugas dan pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian di tahun 2025 ada beberapa 2 (dua) indikator dengan capaian 0% yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI dan Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE.

Rencana tindaklanjut atas capaian pada indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI di tahun 2026 yaitu:

1. Mencanangkan dan menetapkan Rumah Sakit dr. Sobirin sebagai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Membentuk Tim Penilai Mandiri pembangunan ZI
3. Mengikuti dan menginput dokumen penilaian ZI pada portalrb.

Dalam beberapa tahun terakhir capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2023. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.2
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: Kemenpan RB, 2025 (diolah)

Didalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Musi Rawas masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan terutama dalam pencapaian indikator utama yaitu:

1. Masih ada indikator yang bernilai 0 (Nol);
2. Adanya indikator baru pada RB Tematik yang membutuhkan komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Regulasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah yang belum diterjemahkan dari aturan yang lebih tinggi (Roadmap RB);
4. Penyusunan rencana aksi RB yang belum sesuai dengan rencana anggaran perangkat daerah;
5. Pelaksanaan monev rencana aksi RB masih tertumpu pada salah satu perangkat daerah.

Solusi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan diatas yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kembali akan pentingnya reformasi birokrasi kepada stakeholders dilingkungan Kabupaten Musi Rawas;

Akuntabilitas Kinerja

2. Melaporkan dan mengkomunikasikan hasil penilaian reformasi birokrasi kepada pimpinan untuk mengambil langkah-langkah strategis
3. Menyusun tim pelaksana reformasi birokrasi;
4. Menyusun rencana aksi RB dan lebih memfokuskan terhadap capaian indikator yang masih rendah;
5. Melakukan monev rencana aksi RB secara berkala dan melaporkan kepada pimpinan.

Sasaran kinerja meningkatnya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan didukung oleh program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
6. Program Perekonomian dan Pembangunan
7. Program Pendaftaran Penduduk
8. Program Pencatatan Sipil
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Arsip
11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
12. Program Kepegawaian Daerah
13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
14. Program Riset dan Inovasi daerah

Akuntabilitas Kinerja

2. SASARAN MENINGKATNYA LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- Indeks SPBE

Indeks SPBE ditargetkan 3,11 dan terealisasi 3,25 dengan capaian kinerja 104,50 kategori **sangat tinggi**. Target, realisasi dan capaian kinerja ini secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Layanan Pemerintahan
Berbasis Teknologi Informasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks SPBE	3,09	3,11	3,25	104,5	3,23	100,62
Rata-rata capaian					104,50	Sangat Tinggi	

Sumber : LHE SPBE 2025

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dampak yang diharapkan dari penerapan SPBE bagi pemerintah adalah kemudahan operasional, penyederhanaan struktur dan penghematan anggaran, sedangkan dari sisi masyarakat adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup dan layanan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan SPBE sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diantaranya pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Adapun sistem aplikasi yang saat ini telah dijalankan adalah:

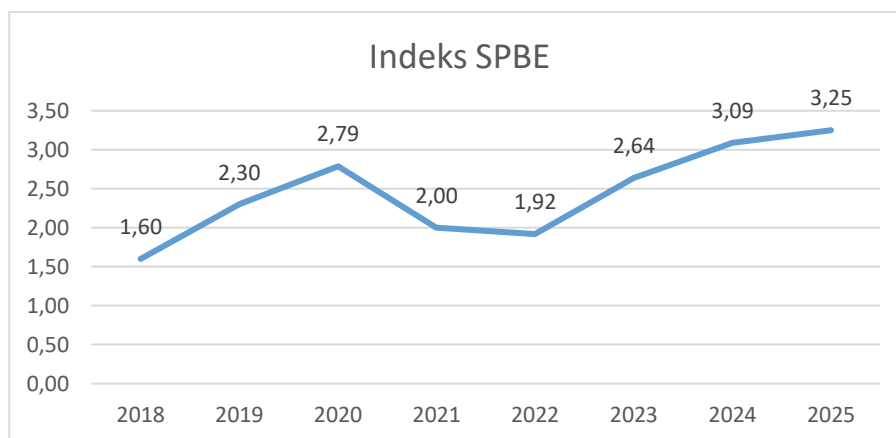
1. SIPD;
2. SIMDA;

Akuntabilitas Kinerja

3. E-RK;
4. Si-Emak;
5. SIAPP;
6. OSS;
7. Simaya
8. Super mantab
9. Active directory

Secara rinci capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir ditampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.3
Indeks SPBE Kabupaten Musi Rawas



Sumber: Dinas Kominfo Kab. Musi Rawas, 2026

Dari grafik diatas Indeks SPBE Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan dari 3,09 menjadi 3,25 atau meningkat sebesar 0,16. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Penyusunan Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemkab. Musi Rawas;
2. Penyusunan SOP SPBE;
3. Penyusunan SOP manajemen data induk dan referensi;
4. Penyusunan SOP manajemen basis data;
5. Penyusunan peta rencana SPBE;

Akuntabilitas Kinerja

Program-program yang mendukung sasaran kinerja meningkatnya layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

3. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

- Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah indikator dalam mencapai sasaran meningkatnya derajat Kesehatan, pada tahun 2025 ditargetkan 74,20 tahun terealisasi 74,45 tahun dengan capaian 100,34% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Usia Harapan Hidup	74,16	74,2	74,45	100,34	76,20	97,70
Rata-rata capaian					100,34	Sangat Tinggi	

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2026

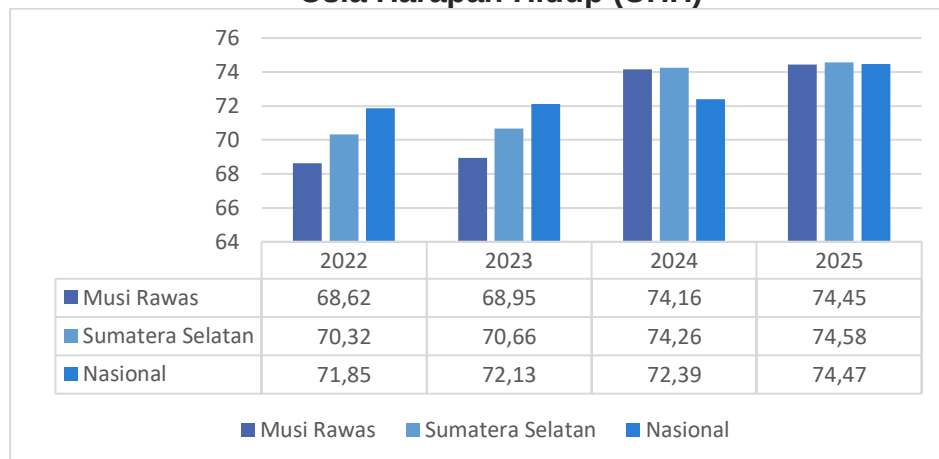
Indeks kesehatan adalah capaian Usia Harapan Hidup (UHH). UHH (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan UHH juga menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang relatif membaik dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian yang tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun sangat kecil. Pada tahun 2025 UHH sebesar 74,45 (*Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2025*) mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 74,16. Namun demikian masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mencapai 74,58. Tetapi diatas Nasional 74,47 tahun. Secara rinci Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Rawas disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Usia Harapan Hidup (UHH)



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas , 2025

Selain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi perhatian khusus karena mengindikasikan bahwa penanganan terhadap kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas. AKI ditargetkan sebesar 41,3

Akuntabilitas Kinerja

per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 15,08 sedangkan AKB ditargetkan 1,23 per 1.000 kelahiran hidup terealisasi 2,26. (Sumber: Dinas Kesehatan, 2026).

Keberhasilan bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Pelaksanaan program GERMAS
2. Perbaikan gizi dan sanitasi lingkungan
3. Program kesehatan masyarakat (Kesehatan ibu dan anak, imunisasi).
4. Jaminan berobat gratis (penerima sebanyak 433.906 penduduk)
5. Ambulan gratis (desa penerima ambulan gratis 23 unit)

Program-program yang mendukung capaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan adalah:

1. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Selain program-program diatas juga didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas yang mudah untuk diakses. Adapun fasyankes tersebut adalah:

Tabel 3.7
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	3
2.	Puskesmas	19
3.	Posyandu	313
4.	Polindes	74

Akuntabilitas Kinerja

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
5.	Poskesdes	128
6.	Poskeslur	2
7.	Pustu	104

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas, 2026

4. MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN

- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2025 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditargetkan sebesar 7,58 terealisasi 7,61 dengan capaian 100,40% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja terhadap akhir RPJMD telah tercapai 99,60%. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

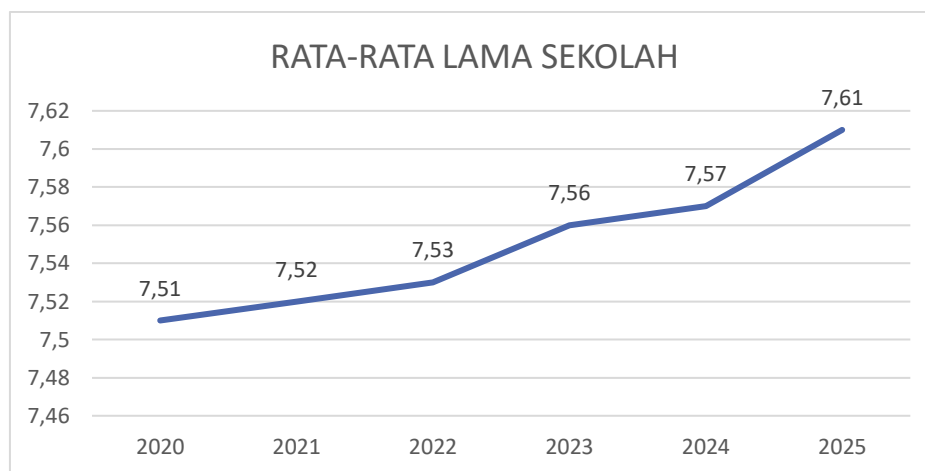
Tabel 3.8
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Derajat Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,57	7,58	7,61	100,4	7,64	99,61
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,23	12,27	12,43	101,3	12,40	100,24
Rata-rata capaian					100,85	Sangat Tinggi	

Sumber; BPS Provinsi Sumsel Tahun 2026

Peningkatan Rata-rata lama sekolah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.5
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS Provinsi Sumsel, 2026

Dari grafik diatas, ada peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas walaupun kenaikannya tidak signifikan. Pada tahun 2025 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,04 tahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas masih dibawah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mencapai 8,91 tahun, bahkan masih dibawah salah satu Kabupaten/kota tetangga seperti Kota Lubuklinggau, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Banyuasin. Secara rinci rata-rata lama sekolah kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Selatan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.9
Angka Rata-rata Lama Sekolah Se-Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah per kabupaten/kota se Sumatera Selatan (Tahun)		
		2023	2024	2025
1	Sumatera Selatan	8,5	8,57	8,91
2	Ogan Komering Ulu	8,85	8,86	9,07
3	Ogan Komering Ilir	7,08	7,19	7,49
4	Muara Enim	8,14	8,27	8,45
5	Lahat	8,56	8,69	9,03
6	Musi Rawas	7,56	7,57	7,61

Akuntabilitas Kinerja

No.	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah per kabupaten/kota se Sumatera Selatan (Tahun)		
		2023	2024	2025
7	Musi Banyuasin	7,68	7,95	8,29
8	Banyuasin	7,46	7,48	7,65
9	Ogan Komering Ulu Selatan	8,05	8,25	8,48
10	Ogan Komering Ulu Timur	8,07	8,08	8,13
11	Ogan Ilir	8,08	8,09	8,16
12	Empat Lawang	7,66	7,68	8,02
13	Pali	7,08	7,27	7,42
14	Musi Rawas Utara	7,5	7,51	7,8
15	Palembang	10,92	10,93	11,25
16	Prabumulih	10,35	10,36	10,37
17	Pagar Alam	9,43	9,44	9,78
18	Lubuk Linggau	9,93	9,94	10,15

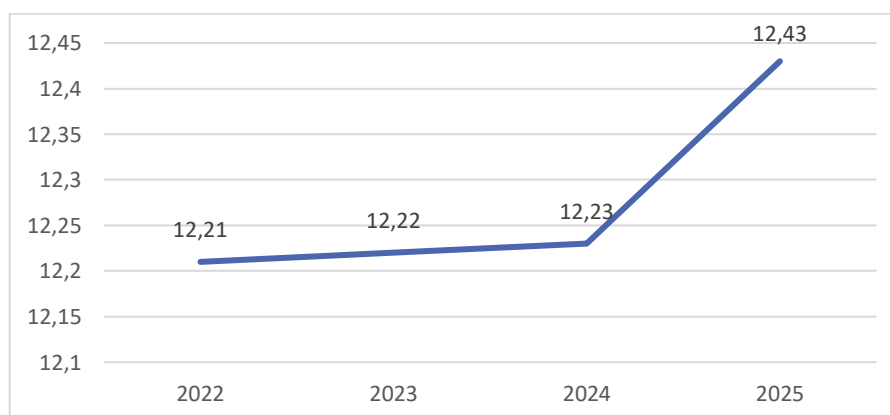
Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2026.

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) salah satu indikator meningkatnya derajat pendidikan, ditargetkan sebesar 12,27 tahun terealisasi 12,43 tahun dengan capaian 101,30% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tahun 2030 terhadap akhir RPJMD telah tercapai 100,24%.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.6
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS Prov.Sumsel, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Dari grafik di atas terlihat bahwa ada kenaikan yang signifikan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2025 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ada peningkatan sebesar 0,20 tahun dalam kurun waktu 1 tahun.

Tabel 3.10
Harapan Lama Sekolah Se-Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah per kabupaten/kota se Sumatera Selatan (Tahun)		
		2023	2024	2025
1	Sumatera Selatan	12,63	12,64	12,65
2	Ogan Komering Ulu	12,99	13	13,01
3	Ogan Komering Ilir	11,97	11,98	11,99
4	Muara Enim	12,01	12,02	12,03
5	Lahat	12,44	12,45	12,46
6	Musi Rawas	12,22	12,23	12,43
7	Musi Banyuasin	12,31	12,33	12,34
8	Banyuasin	12,09	12,34	12,54
9	Ogan Komering Ulu Selatan	11,79	11,82	12,02
10	Ogan Komering Ulu Timur	12,47	12,49	12,66
11	Ogan Ilir	12,41	12,42	12,43
12	Empat Lawang	12,1	12,11	12,12
13	Pali	12,49	12,5	12,69
14	Musi Rawas Utara	11,7	11,9	12,07
15	Palembang	14,45	14,46	14,47
16	Prabumulih	13,31	13,41	13,42
17	Pagar Alam	13,49	13,5	13,51
18	Lubuk Linggau	13,55	13,69	13,88

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2026.

Dari tabel diatas Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Musi Rawas masih diurutan ke-10 dari 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan. Bahkan masih dibawah kabupaten/kota terdekat seperti Kota Lubuklinggau yang telah mencapai 13,88 dan Kabupaten Lahat 12,46.

Komponen lain yang menunjukkan tingkat derajat pendidikan adalah kemudahan masyarakat mengakses pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus berupaya untuk

Akuntabilitas Kinerja

meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah tertentu yang bersekolah. APK dapat diatas 100%. Sedangkan APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai deal APM ialah 100%. Di bawah ini disajikan APK dan APM jenjang pendidikan di Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 3.11
APK dan APM Jenjang Pendidikan Kab. Musi Rawas

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio	
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	98,05	96.19	106,94	109.51
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	72,73	73.04	79,57	84.67
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	58,90	75.42	92,66	102.33

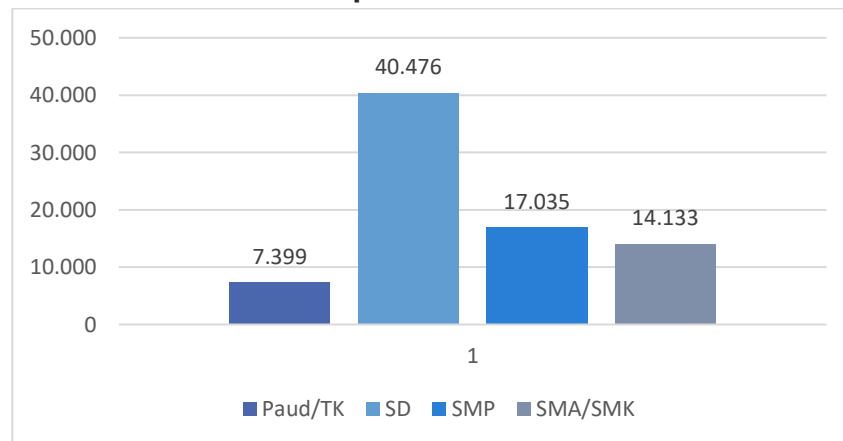
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Dari tabel diatas terlihat ada peningkatan nilai APK baik pada jenjang SD/MI sederajat, jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/sederajat. Sedangkan untuk APM jenjang SD/MI mengalami penurunan. Namun pada jenjang SMP/MTs/sederajat dan SMA/SMK/MA/sederajat mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan bahwa kebijakan di bidang pendidikan yang menerapkan usia sekolah harus sesuai dengan jenjang pendidikan.

Akuntabilitas Kinerja

Jumlah siswa di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025 dari jenjang PAUD/TK sampai dengan SMA/SMK berjumlah 79.043 siswa. Jumlah terbesar ada pada jenjang SD yaitu 40.476 siswa, secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.7
Jumlah Siswa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas, 2026

Secara umum capaian kinerja pada sasaran meningkatnya derajat pendidikan belum sesuai target yang diharapkan. penyebabnya adalah:

1. Kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola pendidikan yang perlu ditingkatkan;
2. *Reward and punishment* yang belum diterapkan
3. Masih ada sarana dan prasarana pendidikan yang belum representatif dan nyaman.
4. Tata kelola atau manajemen pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius terutama transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Solusi yang akan dilakukan adalah:

1. Mendorong inovasi bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan;
3. Memberikan bantuan pakaian gratis untuk siswa kurang mampu;
4. Menerapkan *reward dan punishment* kepada pelaku pendidikan; dan
5. Memaksimalkan sumber daya pendidikan yang ada dengan meningkatkan manajemen/tata kelola yang akuntabel dan efisien.

Akuntabilitas Kinerja

Dalam mendukung meningkatnya derajat pendidikan di Kabupaten Musi Rawas terdapat program prioritas yaitu program pakaian seragam gratis. Capaian dan rencana program pakaian seragam gratis tahun 2024/2025 dan rencana tahun 2026 secara rinci tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Data Capaian Program Pakaian Seragam Gratis Tahun 2024-2025
dan Rencana Tahun 2026

No	Program	Capaian		Rencana
		2024	2025	2026
1.	Pakaian Seragam SD	15.453	12.803	3.047
2.	Pakaian Seragam SMP	7.153	9.600	3.057

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas, 2026

Peningkatan kualitas pendidikan juga tidak terlepas dari kualitas dan kapabilitas guru. Program sertifikasi guru merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Kabupaten Musi Rawas telah melakukan sertifikasi guru dan telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Guru yang telah disertifikasi sampai tahun 2025 berjumlah 2.615 orang, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Data Guru Sertifikasi Kab. Musi Rawas Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Sertifikasi	Non Sertifikasi
1.	SD	1810	706
2.	SMP	787	198
3.	PAUD	18	24
Jumlah		2615	924

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Rawas dari jenjang Paud/TK sampai SMA/SMK sebanyak 734 sekolah. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Data Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Paud/TK	296	TK, KB, SPS, dan TPA
2.	SD	320	SDN dan SDS
3.	SMP	80	SMPN dan SMPS
4.	SMA/SMK	38	SMAN/SMKN dan SMAS/SMKAS

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas, 2026

Program-program yang mendukung kinerja pada bidang pendidikan adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Izin Pendidikan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

5. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

- Persentase konektivitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas wilayah ini diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi dan interaksi sosial masyarakat secara langsung. Terhubungnya kawasan produksi dengan kawasan distribusi dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengakselerasi perekonomian rakyat.

Akuntabilitas Kinerja

Konektivitas daerah juga dapat meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Misalnya pasokan air bersih, aliran listrik, penganggulungan sampah dan limbah, pendidikan, kantor imigrasi, pembuatan surat izin mengemudi, kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), keamanan, juga penjara. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang terdidik. Pemerataan pelayanan umum di bidang kesehatan, memberikan masyarakat kemudahan untuk berobat saat sakit, mengalami kecelakaan, maupun akan melahirkan.

Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar wilayah tercapai dengan kategori **tinggi**. Hal ini dapat dilihat dari capaian Persentase Konektivitas Antar Wilayah yang terealisasi 82,95% dari target 94,08% atau dengan capaian 88,17%. Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 86,40%. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase konektivitas antar wilayah	93,8	94,08	82,95	88,17	96,00	86,41
Rata-rata capaian					88,17	Tinggi	

Sumber: Dinas PUBM Kab. Musi Rawas, 2025

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah komponen utama untuk mencapai target kinerja sasaran ini. Capaian kinerja jalan dalam berbagai kondisi di Kabupaten Musi Rawas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

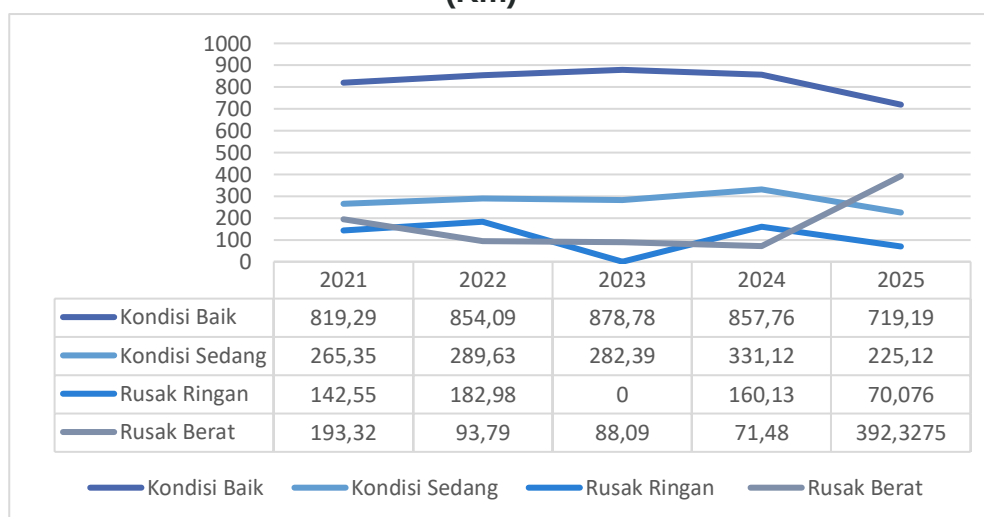
Tabel 3.16
Capaian Kinerja Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 – 2025

No	Indikator	2022		2023		2024		2025	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	Kondisi Baik	854,09	60,13	878,78	61,86	857,76	60,39	719,10	51,12
2	Kondisi Sedang	289,63	20,39	282,39	19,88	331,12	23,31	225,12	16,00
3	Rusak Ringan	182,98	12,88	171,24	12,06	160,13	11,27	70,076	4,98
4	Rusak Berat	93,79	6,60	88,09	6,20	71,48	5,03	392,3275	27,89

Sumber: Dinas PUBM Kab. Musi Rawas, 2026

Pembangunan infrastuktur jalan di Kabupaten Musi Rawas dalam kondisi baik dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Capaian kinerja pembangunan jalan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini;

Grafik 3.8
Capaian Kinerja Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2025 (Km)



Sumber : Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas, 2026

Jembatan juga merupakan objek terpenting dalam meningkatkan konektivitas atau penghubung antar wilayah, capaian kinerja pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 - 2025

No	Indikator	2022		2023		2024		2025	
		Meter	%	Meter	%	Meter	%	Meter	%
1	Kondisi Baik	4323,3	89,71	1464	30,26	1523,50	31,31	837,00	17,46
2	Kondisi Sedang	388,6	8,06	3203,9	66,23	3184,80	65,45	3362,65	70,13
3	Rusak Ringan	47	0,98	113	2,34	101	2,07	429,20	8,95
4	Rusak Berat	60,5	1,26	57	1,18	57	1,18	166,00	3,46

Sumber : Dinas PU Bina Marga, 2026

Permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan akses jalan dan jembatan adalah:

1. Keterbatasan pendanaan infrastruktur.
2. Besarnya potensi kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten;
3. Pemanfaatan potensi daerah (seperti: material dan tenaga kerja) dalam pemenuhan infrastruktur jalan; belum berjalan maksimal
4. Pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi untuk pengurangan ketimpangan wilayah belum terpenuhi; dan
5. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya belum optimal.

Solusi yang dilakukan:

1. Meningkatkan konektivitas lokus-lokus ekonomi masyarakat; dengan pembangunan infrastruktur jalan;
2. Pemanfaatan sistem informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur Jalan;
3. Pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan; dan
5. Optimalisasi sumberdaya lokal dalam pembangunan infrastuktur jalan.

Akuntabilitas Kinerja

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain:

1. Program penanganan jalan sesuai dengan skala prioritas terus diutamakan;
2. Memenuhi ketercukupan jumlah jalan kabupaten,
3. Meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten,
4. Meningkatkan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan sarana prasarana jalan. Program dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain:

1. Program penyelenggaraan jalan
2. Program pengembangan jasa konstruksi
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

6. MENINGKATNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR, PERUMAHAN DAN SUMBER DAYA AIR

Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat guna meningkatkan daya saing daerah. Selain itu pembangunan infrastruktur diharapkan seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat bergerak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 salah satu sasaran yang ingin di capai yaitu Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar, Perumahan dan Sumber Daya Air sebagai indikatornya adalah Indeks Infrastruktur Dasar dan Indeks Sumber Daya Air. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Target, Realisasi Dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar, Perumahan dan
Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Infrastruktur Dasar	99,32	99,37	93,38	93,97	99,80	93,57
2	Indeks Sumber Daya Air	49,85	49,85	51,02	102,35	62,39	81,78
Rata-rata capaian					98,16	Sangat Tinggi	

Sumber: Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas, 2026

- Indeks Infrastruktur Dasar

Indeks Infrastruktur dasar merupakan komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik. Indeks Infrastruktur Dasar pada tahun 2025 ditargetkan 99,37 dan terealisasi 93,38 dengan capaian 93,97% (kategori sangat tinggi). Sementara capaian terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 93,57%. Tetapi realisasi tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapaiannya indeks infrastruktur dasar adalah persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum yang layak dan rasio elektrifikasi telah tercapai dengan baik. Capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

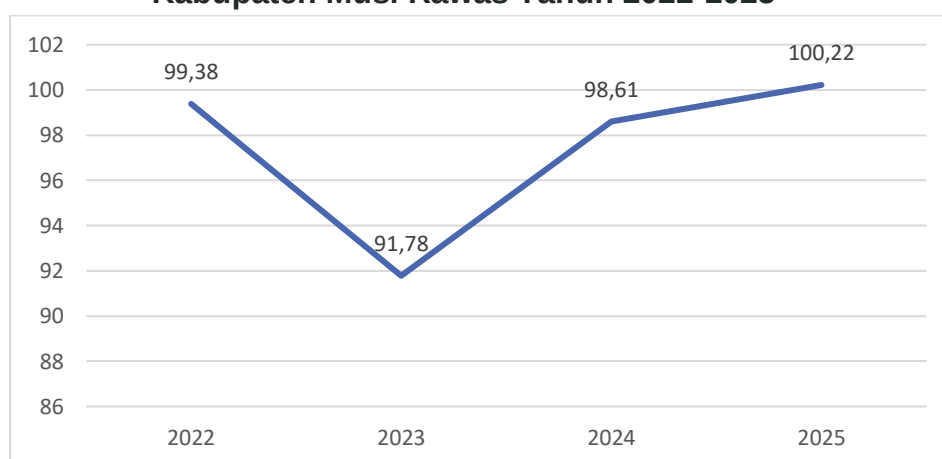
Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sanitasi, Air Minum dan rasio Elektrifikasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 - 2025

NO	URAIAN	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	99,15	99,27	99,8	112,16
2	Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum Yang Layak	%	99,03	99,27	99,55	103,01
3	Rasio Elektrifikasi	%	96,38	91,78	98,61	100,22

Sumber : Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas, 2026

Rasio elektrifikasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2022 sampai tahun 2025 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2022 rasio elektrifikasi 96,38% menjadi 100,22% di tahun 2025 masyarakat yang mendapatkan pelayanan listrik . Secara rinci capaian kinerja ini disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.9
Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas, 2026

- Indeks Sumber Daya Air

Indeks Sumber Daya Air merupakan gabungan dari penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) suatu wilayah dan Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi (ILKT). Realisasi indeks Sumber Daya Air Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebesar 51,02, melebihi target yang telah ditetapkan

Akuntabilitas Kinerja

yaitu 49,85 dengan persentase capaian sebesar 102,35% dengan kriteria **Sangat Tinggi**, capaian kinerja ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024. Pencapaian ini telah memberikan capaian 81,78% pada akhir tahun RPJMD.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tercapaiannya indeks sumber daya air adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi. Secara rinci indeks kinerja system irigasi dan indeks luas Kawasan yang terlindungi secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja
Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Indeks Luas Kawasan Yang
Terlindungi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022-2025

URAIAN	Satuan	2022	2023	2024	2025
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	61,48	62,13	62,17	92,17
Indeks Luas Kawasan Yang Terlindungi	%	59,71	55,16	60,71	100,90

Sumber : Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas, 2026

Pada tahun 2025 indeks kinerja sistem irigasi dan indeks luas Kawasan yang terlindungi mengalami peningkatan yang kecil. Indeks kinerja sistem irigasi hanya meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya dan indeks luasan Kawasan yang terlindungi meningkat sebesar 40,19%. Indeks kinerja sistem irigasi dapat meningkat ditunjang oleh adanya rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan pada saluran tersier dan petak-petak sawah. Selanjutnya untuk indeks luasan Kawasan yang terlindungi meningkatkan didukung oleh adanya pembangunan wilayah sungai, sosialisasi normalisasi DAS, dan penanaman pohon di sekitar DAS.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukandalam mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, Komunikasi).

Program-program yang mendukung kinerja sasaran ini adalah;

Akuntabilitas Kinerja

1. Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
4. Program pengembangan perumahan
5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
6. Program Kawasan Permukiman
7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Program penataan bangunan gedung
10. Program penataan bangunan dan lingkungannya

7. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan IKTL yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Informasi ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

Realisasi IKLH Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebesar 76,88 melebihi target sebesar 71,14 atau dengan capaian 108,07% masuk dalam kriteria Sangat Tinggi, dan capaian tersebut juga meningkat dibandingkan tahun 2024. Capaian terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 106,19%. Target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup disajikan pada tabel di bawah ini.

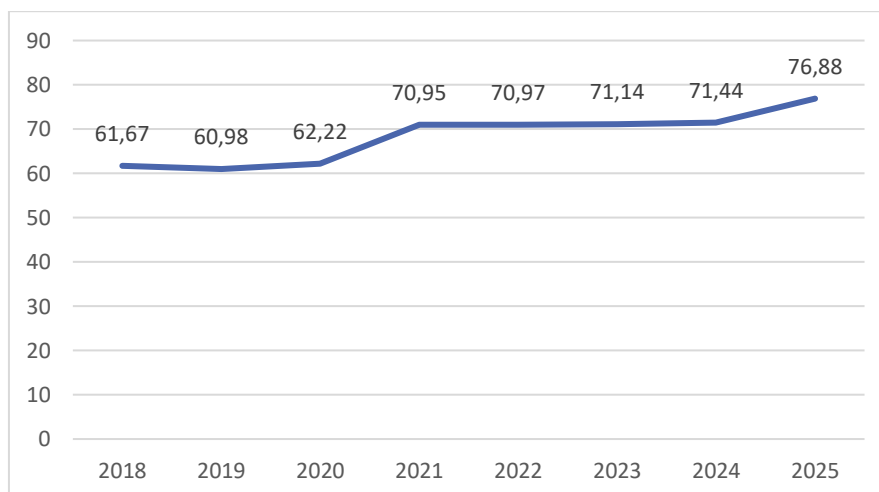
Tabel 3.21
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,44	71,14	76,88	108,07	72,40	106,19
2	Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)	N/A	654.108,15	874.480	133,69	967.687,96	90,37
Rata-rata capaian					120,88	Sangat Tinggi	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Musi Rawas 2026

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.10
Capaian Indeks Kuaslitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018- 2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas 2026

Upaya peningkatan kualitas air sungai dilakukan dengan: pendampingan dan sosialisasi pengelolaan limbah industri secara mikro, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas dan masyarakat

Akuntabilitas Kinerja

peduli sungai, Intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap penataan izin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha.

Pencapaian target indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur kinerja Kabupaten Musi Rawas dalam penanganan masalah kualitas udara ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Peningkatan kualitas udara didukung oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghijauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang semakin meningkat dan membaik.

- Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Indikator. **Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** berhasil direalisasikan sebesar **874,480 ton CO₂e**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 654,108,15 ton CO₂e atau dengan capaian kinerja sebesar **133,69% (Kategori Sangat Baik)**, hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan daerah dalam pengendalian emisi karbon-bersinergi dengan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Kualitas Lahan (IKL) yang prima telah memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ternyata dalam target RPJMD cenderung meningkat, sebenarnya ini adalah kontribusi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Target kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Bappeda Prov. Sumatera Selatan tanggal 6 September 2024 perihal Penyampaian Target Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 dan selanjutnya ditetapkan menjadi target Kabupaten Musi Rawas dalam RPJMD 2025-2029.

Akuntabilitas Kinerja

Selanjutnya target di tahun 2025 Kabupaten/kota berdasarkan surat tersebut tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Target Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1	Ogan Komering Ulu	204.268,67
2	Ogan Komering Ilir	2.121.264,43
3	Muara Enim	8.005.066,77
4	Lahat	187.024,11
5	Musi Rawas	654.108,15
6	Musi Banyuasin	1.828.335,80
7	Banyuasin	5.010.054,71
8	Ogan Komering Ulu Selatan	155.181,23
9	Ogan Komering Ulu Timur	273.154,65
10	Ogan Ilir	80.979,57
11	Empat Lawang	183.631,33
12	Pali	287.342,64
13	Musi Rawas Utara	639.336,12
14	Kota Palembang	10.144,83
15	Kota Prabumulih	26.375,98
16	Kota Pagar Alam	51.487,98
17	Kota Lubuklinggau	21.780,11

Sumber: Bappeda Prov. Sumsel, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Musi Rawas lebih tinggi dari Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, hal mengindikasikan bahwa Kabupaten Musi Rawas berpotensi adanya peningkatan GRK yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kontribusi penurunan emisi GRK yang telah dicapai dengan realisasi **874,480 ton CO₂e** dari target **654.108,15 ton CO₂e** didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah:

Akuntabilitas Kinerja

1. Efektifnya pelaksanaan program pencegahan kebakaran hutan, pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan.
 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah padat yang berada pada TPA Gegas yang dikelola menggunakan sistem pengelolaan *sanitary landfill* dan *gasifikasi*.
 3. Wilayah Kabupaten Musi Rawas sudah mendapatkan akses sanitasi layak yaitu fasilitasi sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
 4. Pengendalian limbah peternakan, pertanian dan sektor industry
- Program-program yang mendukung ketercapaian kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah:
1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 2. Program pengelolaan persampahan
 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

8. MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN RUANG

- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Sasaran meningkatnya penataan ruang tercapai ***Sangat Tinggi***. Hal ini dilihat dari indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang ditargetkan 92,26 terealisasi 92,25% dengan capaian sebesar 99,99%.

Akuntabilitas Kinerja

Capaian ini menyumbangkan 94,85% dari target akhir RPJMD. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	57,23	92,26	92,25	99,99	97,26	94,85
Rata-rata capaian					99,99	Sangat Tinggi	

Sumber: Dinas PUCKTRP, 2026

Permasalahan yang dialami dalam menyelesaikan kinerja ini adalah:

1. Belum maksimalnya penegakan hukum penataan ruang terhadap tindakan pelanggaran pemanfaatan ruang
2. Forum penataan ruang kabupaten belum berfungsi secara ideal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Masih ada entitas yang melakukan alih fungsi lahan menjadi peruntukan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan
4. Minimnya pengetahuan masyarakat umum akan zonasi hutan yang berbatasan dengan lahan masyarakat yang ada
5. Sumber daya manusia yang membidangi tata ruang masih terbatas sehingga memerlukan recruitmen SDM sesuai disiplin ilmu.

Solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas adalah:

Akuntabilitas Kinerja

1. Menyusun *Time Schedule* dan monitoring *Time Schedule* percepatan pelaksanaan tahapan proses legalisasi rancangan Perda RTRW Tahun 2026 dan Raperda turunannya.
2. Mengfungsikan forum penataan ruang kabupaten sebagai forum koordinasi penyelenggaraan penataan ruang sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Anggota forum penataan ruang kabupaten yang diisi oleh instansi vertikal penataan ruang, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat diupayakan dapat bekerja sebagaimana mestinya yakni bertugas dalam 3 (tiga) aspek; perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Meningkatnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan tata ruang, tentang dilarangnya penggunaan area Kawasan sempadan sungai dan area pertanian untuk dialihfungsikan menjadi peruntukan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya penataan ruang. Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis ini, terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

9. MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA

- Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur kapasitas (kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemulihan) suatu daerah dalam menghadapi, menanggulangi, serta meminimalkan dampak bencana. Dikelola oleh BNPB, IKD digunakan sebagai indikator kinerja utama (IKU) untuk mengevaluasi ketangguhan wilayah dan menentukan langkah kebijakan pengurangan risiko bencana. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 ditargetkan 0,4 terealisasi 0,27 dengan capaian 67,5 dengan kategori (Sedang). Sedangkan capaian akhir RPJMD baru

Akuntabilitas Kinerja

mencapai 45%. Secara rinci target, realisasi, capaian sasaran meningkatnya ketahanan bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Bencana

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,36	0,4	0,27	67,5	0,6	45,00
Rata-rata capaian					67,5	Sedang	

Sumber: BPBD kab. Musi Rawas 2026

Indikator lain yang terkait dengan Indeks ketahanan Daerah adalah indeks resiko bencana. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025 Indeks Resiko Bencana sebesar 151,72 hal ini mengindikasikan bahwa resiko bencana yang lebih besar. Sebagai perbandingan indeks ketahanan daerah dan indeks resiko bencana di Provinsi Sumatera Selatan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Banyuasin	0,48	102,82
Empat Lawang	0,38	193,27
Kota LubukLinggau	0,32	151,44
Kota Pagar Alam	0,22	161,61
Kota Palembang	0,29	105,17
Kota Prabumulih	0,23	121,01
Lahat	0,26	196,39
Muara Enim	0,47	168,35
Musi Banyuasin	0,44	108,18
Musi Rawas	0,27	151,72
Musi Rawas Utara	0,54	133,51
Ogan Ilir	0,59	85,60
Ogan Komering Ilir	0,37	135,50
Ogan Komering Ulu	0,37	185,34
Ogan Komering Ulu Selatan	0,61	113,63
Ogan Komering Ulu Timur	0,50	139,07
Penukal Abab Lematang Ilir	0,37	121,70

Sumber: BNPB, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Kabupaten Musi Rawas berada dalam rawan bencana dengan resiko bencana tinggi dan pernah mengalami bencana yang cukup parah. Terkait dengan itu, dituangkan dalam RPJMD dan misi Bupati. Indikator ini spesialistik. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam desa tangguh bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumberdaya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menjadikan Kabupaten Musi Rawas Tangguh Bencana adalah:

1. Belum tersedianya instrument krusial dalam manajemen bencana di daerah seperti dokumen kajian resiko bencana dan Peraturan Daerah Pelaksanaan/Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan dokumen Rencana Konjitemsi yang belum tersusun.
2. Klasifikasi grade BPBD Kabupaten Musi Rawas masih pada klasifikasi B.
3. Belum tersusunya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA).

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Menyusun Perda pelaksanaan/Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dokumen kajian resiko bencana dan Peraturan Daerah Pelaksanaan/Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan dokumen Rencana Konjitemsi.
2. Telah dinaikan klasifikasi BPBD dari kelas B ke kelas A dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Program-program yang mendukung penanggulangan bencana adalah:

1. Program penanggulangan Bencana

10. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN

- Kontribusi PDRB Sektor Pertanian

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian ditargetkan 29,96% dengan realisasi 34,93% dengan capaian 116,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 114,49% atau telah melebihi target yang telah

Akuntabilitas Kinerja

ditetapkan yaitu 30,51%. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

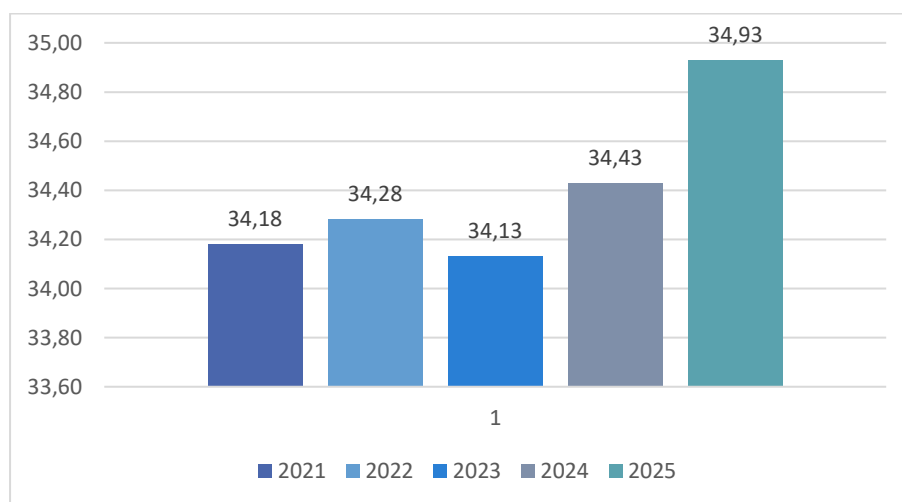
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (Persen)	34,43	29,96	34,93	116,59	30,51	114,49
Rata-rata capaian					116,59		

Sumber: DTPHP Kab. Musi Rawas, 2026

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian menggunakan data PDRB dengan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 adalah nilai tambah barang/jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar (tahun acuan tertentu), sehingga tidak dipengaruhi inflasi. Metode ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dan perkembangan produksi riil dari tahun ke tahun tanpa pengaruh kenaikan harga.

Perbandingan kontribusi PDRB sektor pertanian Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.11
Perbandingan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (Dalam Persen)



Sumber: Musi Rawas Dalam Angka, 2026

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didukung oleh produksi pertanian terutama tanaman pangan. Mengingat Kabupaten Musi Rawas adalah sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir produksi padi terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya adanya alih fungsi lahan produktif dan gagal panen yang disebabkan perubahan musim ekstrim. Produksi pertanian yang banyak menyumbang pada PDRB tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.27
Capaian Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Musi Rawas

Produksi	Tahun (ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Padi	377.873	11.394	245.224	221.712	196.240
Jagung	62.176	5.182	28.773	30.074	10.880
Kedelai	29	0	2	339	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2026

Selain hasil pertanian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga menggenjot produksi peternakan yaitu daging dan telur. Diharapkan

Akuntabilitas Kinerja

Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu kabupaten yang berswasembada daging. Peningkatan produksi daging dan telur secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

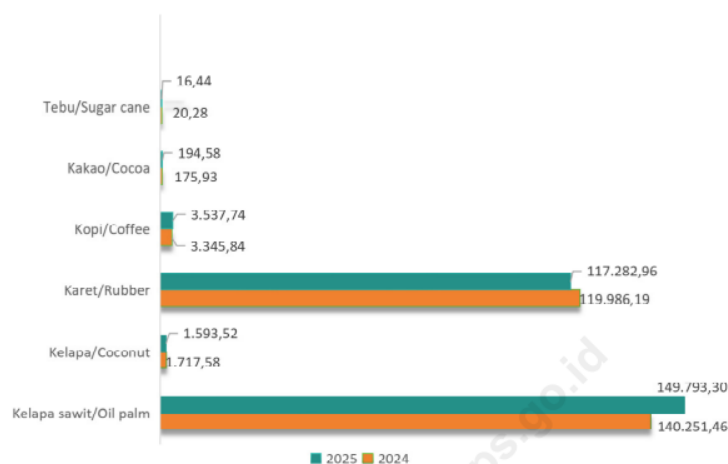
Tabel 3.28
Capaian Produksi Daging dan Telur Kabupaten Musi Rawas

Produksi	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Daging	3.225	3.447,81	3.592.572	3.576,39	3.677,56
Telur	2.021	2.010,59	2.206.563	2.250,68	2.519,445

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2026

Penyumbang PDRB sektor pertanian yang paling tinggi disumbang dari sektor perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan dari 140.251,46 ton di tahun 2024 menjadi 149.793,30 ton di tahun 2025 atau meningkat sebesar 9.541,84 ton. Untuk produksi karet juga mengalami penurunan dari 119.986,19 ton menjadi 117.282,96 ton atau turun sebesar 2.703,23 ton. Penurunan produksi karet disebabkan oleh masyarakat yang merubah komoditas karet menjadi kelapa sawit, sebagian besar lahan karet berubah menjadi lahan kelapa sawit. Masyarakat lebih tertarik menanam kelapa sawit dibandingkan karet karena harga kelapa sawit cenderung menjanjikan dibandingkan karet. Secara rinci produksi komoditas perkebunan di tahun 2024-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.12
Produksi Komoditas Perkebunan Kab. Musi Rawas
2024-2025 (Ton)



Sumber/Source : Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas/ Plantation Service of Musi Rawas Regency

Selain penghasil komoditas perkebunan juga penghasil komoditas perikanan darat. Bendung sungai Kelingi dan Air Lakitan memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil perikanan selain memberi pasokan air untuk kebutuhan pertanian juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Budidaya perikanan meliputi budidaya perikanan konsumsi, ikan hias dan benih ikan. Selain perikanan budidaya, pemerintah daerah juga mendorong perikanan tangkap oleh masyarakat dengan memanfaatkan danau, aliran sungai, dan rawa. Produksi perikanan juga memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan PDRB sektor pertanian. Capaian hasil perikanan di Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29
Capaian Produksi Hasil Perikanan

PRODUKSI	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perikanan Tangkap (Ton)	483,52	545,19	545,45	545,83	546,00
Perikanan Budidaya (Ton)	64.630,40	32.838,82	39.534,67	43.425,70	44.155,09

Akuntabilitas Kinerja

Benih Ikan (ekor)	963.277	491.233	518.339	519.758,72	519.842
Ikan Hias (ekor)	595.000	546.000	548.000	553.750	565,050

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas, 2026

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian dalam mendukung PDRB yaitu:

1. Perubahan iklim yang ekstrem (kekeringan dan banjir);
2. Serangan hama dan penyakit tanaman;
3. Serangan wabah penyakit jembrana;
4. Keterbatasan benih unggul;
5. Ketersediaan air;
6. Keterbatasan ketersediaan pupuk organik;
7. Konflik pemanfaatan air; dan
8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian (pompa air, sumur bor, dan embung/dam parit);
2. Pemanfaatan informasi ramalan cuaca;
3. Pelaksanaan Gerakan pengendalian hama;
4. Gerakan gropyokan pengendalian hama tikus;
5. Pengamatan dini terhadap serangan hama dan penyakit tanaman;
6. Pemberian vaksin jembrana secara kontinyu selama 5 tahun;
7. Pengamatan dan pengendalian lalu lintas ternak; dan
8. Mengendalikan alih fungsi lahan dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

Akuntabilitas Kinerja

5. Program Penyuluhan Pertanian;
6. Program Perizinan Usaha Pertanian;
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
11. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
12. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
13. Program Pengawasan Keamanan Pangan

11. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN

Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terdiri dari 2 (dua) alat ukur yaitu PDRB sektor industri dan PDRB sektor perdagangan. Target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	14,75	14,97	12,87	85,97	16,05	80,19
2	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	2,38	2,52	8,53	338,49	3,22	264,91
Rata-rata capaian					212,23	Sangat Tinggi	

Sumber: DISPERINDAG Kab. Musi Rawas, 2026

Akuntabilitas Kinerja

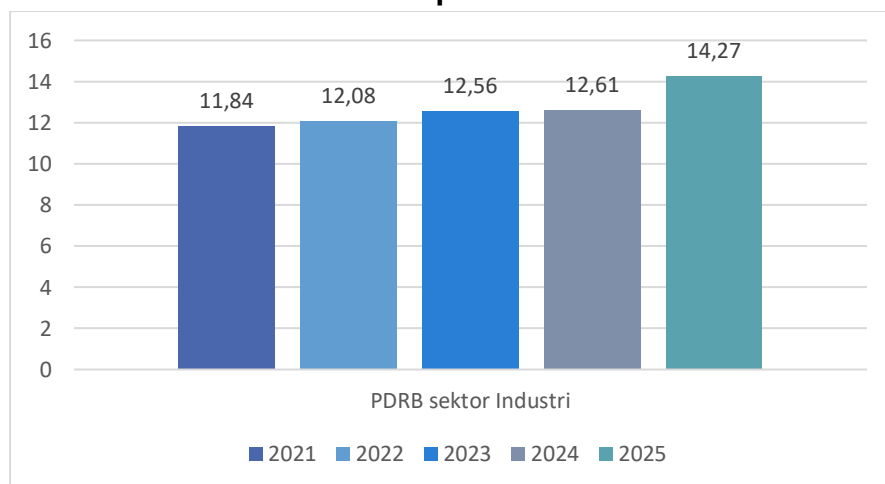
- Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Dari tabel diatas kontribusi PDRB sektor industri pengolahan ditargetkan 14,97% dengan realisasi 12,87% dengan capaian 85,97% atau kategori **Tinggi**. Perbandingan dengan target akhir RPJMD 16,05 % maka capaian kinerja diakhir RPJMD ini telah mencapai 80,19%.

Pengelolaan sektor industri pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Intensitas dari masalah tersebut karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah. Dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB.

Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan, terutama di tahun 2025 ini. Secara rinci PDRB sektor industri disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.13
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Musi Rawas



Sumber : Musi Rawas Dalam Angka, 2026

Akuntabilitas Kinerja

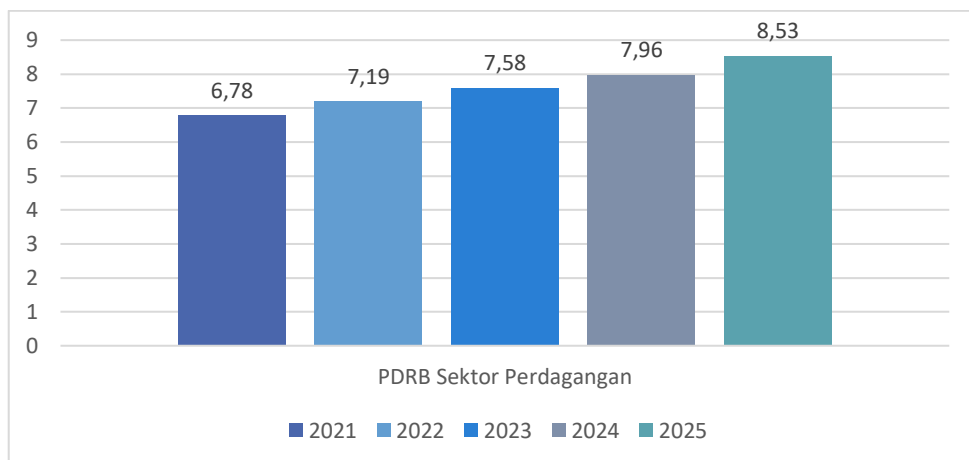
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024, ada peningkatan sebesar 1,66%. Peningkatan ini di dukung oleh peningkatan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di tahun 2024 berjumlah 2.469 IKM dan meningkat menjadi 2.583 IKM di tahun 2025 atau ada peningkatan sebesar 114 IKM.

- Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Persen)

Selain PDRB sektor industri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB sektor perdagangan pun juga memberikan kontribusi yang besar. Pada tahun 2025 PDRB sektor perdagangan ditargetkan 2,52% terealisasi 8,53% dengan capaian 338,49% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir kinerja RPJMD 3,22% maka capaiannya 264,91% atau telah melampaui target RPJMD.

Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan seperti tertera pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.14
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas



Sumber : Musi Raws Dalam Angka, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak signifikan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah berupaya untuk terus meningkatkan dan mendorong sektor perdagangan. Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan terus mengalami peningkatan yang tahun sebelumnya.

Prasarana perdagangan berupa pasar, kios dan lain-lain di Kabupaten Musi Rawas secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.31
Prasarana Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

No	Prasarana	2024	2025
1.	Pasar	61	61
2.	Kios	648	648
3.	Toko	58	68
4.	Warung	2.695	2.776

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka, 2025-2026

Keberhasilan ini di dukung oleh :

1. Pembangunan sudah mulai rata dari kecamatan dan desa
2. Meningkatnya harga produk unggulan Kabupaten Musi Rawas di tingkat nasional seperti tingginya harga buah sawit, karet dan kopi serta produk perkebunan dan pertanian lainnya
3. Meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat
4. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha perdagangan akan pentingnya legalitas atau perizinan
5. Lancarnya distribusi barang dan jasa

Selain fakfor-faktor diatas yang mendukung kinerja pertumbuhan, juga didukung oleh program-program strategis yang telah ditetapkan yakni:

1. Program perencanaan dan Pembangunan industry
2. Program pengendalian izin usaha industri
3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Akuntabilitas Kinerja

5. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
6. Program pengembangan ekspor
7. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
8. Program Perizinan pendaftaran perusahaan
9. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

12. MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

- Peningkatan Nilai Investasi (Rp)

Investasi di Kabupaten Musi Rawas diukur dengan Indikator peningkatan nilai investasi (Rp). Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar Rp. 850 M realisasi sebesar Rp. 1.307 M dengan capaian 153,76% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian tahun ini telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 108,92%. Target, realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

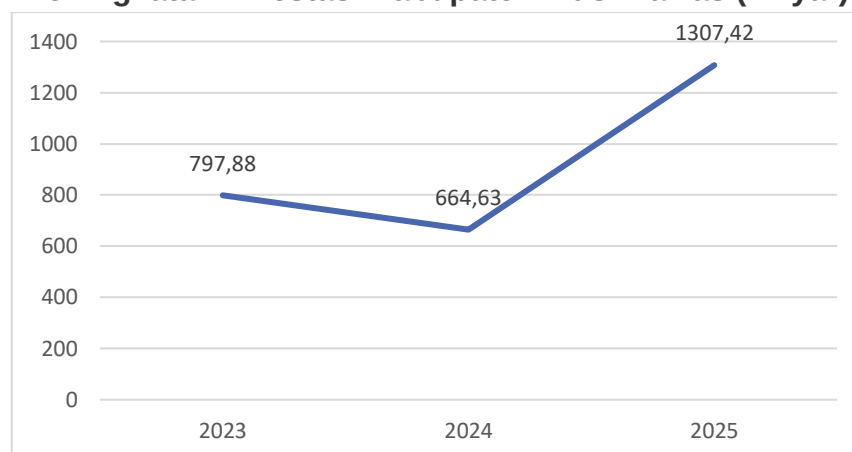
Tabel 3.32
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Musi Rawas

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	664 M	850 M	1.307 M	153,76	1.200 Milyar	108,92
Rata-rata capaian					153,76	Sangat Tinggi	

Sumber: LKPM DPMPTSP PROV. SUMSEL 2025

Perbandingan investasi di Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

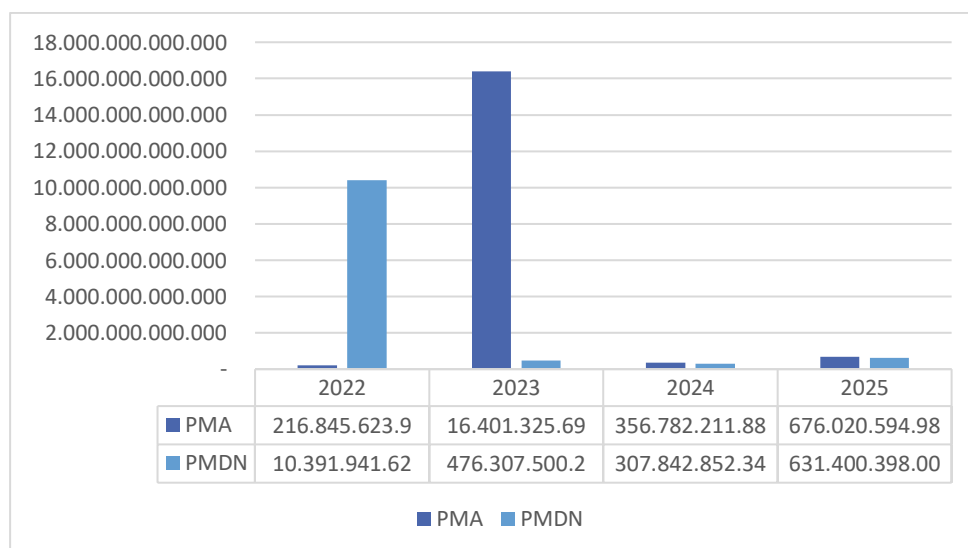
Grafik 3.15
Peningkatan Investasi Kabupaten Musi Rawas (Milyar)



Sumber; LKPM Prov. Sumsel 2026

Investasi di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Di tahun 2025 investasi di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 1,307,420,992,988,- (sumber: LKPM DPMPTSP SUMSEL, 2025).

Grafik 3.16
Capaian Investasi PMA dan PMDN
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: LKPM DPMPTSP SUMSEL, 2025).

Peningkatan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas didukung oleh beberapa kebijakan yang memihak kepada investor diantaranya adalah :

Akuntabilitas Kinerja

1. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) dalam dokumen perizinan dan non perizinan;
2. Kebijakan percepatan pelaksanaan PP No.91 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan OSS (*Online Single Submission*) dan SICANTIK Cloud.
3. Tersedianya informasi digital dan Mal Pelayanan Publik (MPP)
4. Adanya peta potensi Kabupaten Musi Rawas
5. Tersedianya Selayang pandang
6. Adanya pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai ajang promosi

Selain kebijakan-kebijakan diatas didukung juga oleh beberapa program yaitu:

1. Program pelayanan penanaman modal
2. Program pengembangan iklim penanaman modal
3. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
4. Program Promosi penanaman modal
5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

13. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman

Indikator keberhasilan atau kegagalan pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di kabupaten Musi Rawas adalah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makanan dan minuman. Tahun 2025 ditargetkan 0,38% dan terealisasi 0,32% dengan capaian 84,21% dengan kategori **Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD telah mencapai 78,05%.

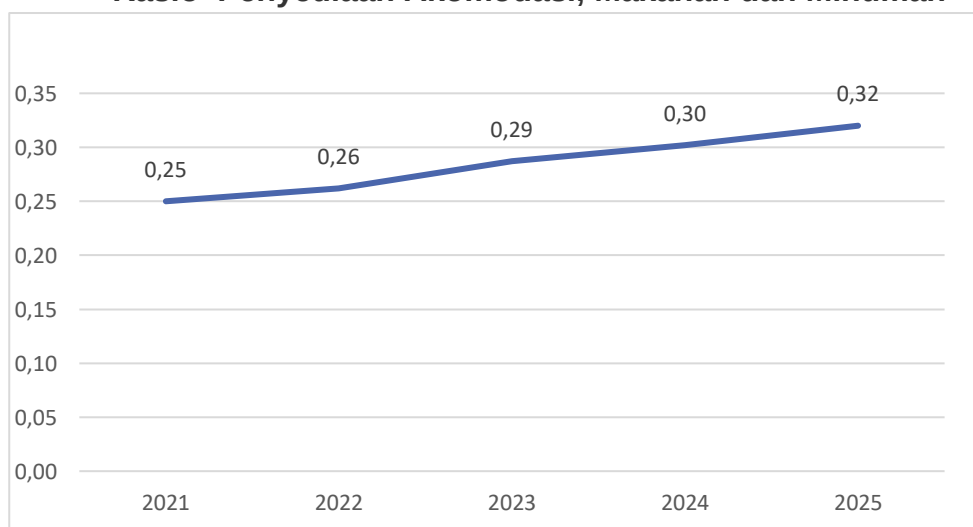
Tabel 3.33
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	0,38	0,38	0,32	84,21	0,41	78,05
Rata-rata capaian					84,21	Tinggi	

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka, 2026

PDRB penyediaan akomodasi, makanan dan minuman berdasarkan ADHK sebesar Rp 53,20 Milyar atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 48,14 milyar. Sedangkan rasio PDRB penyediaan akomodasi makanan dan minuman hanya menyumbang 0,32% dari total PDRB di tahun 2025. Secara rinci rasio PDRB penyediaan akomodasi, makanan dan minuman terhadap total PDRB dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

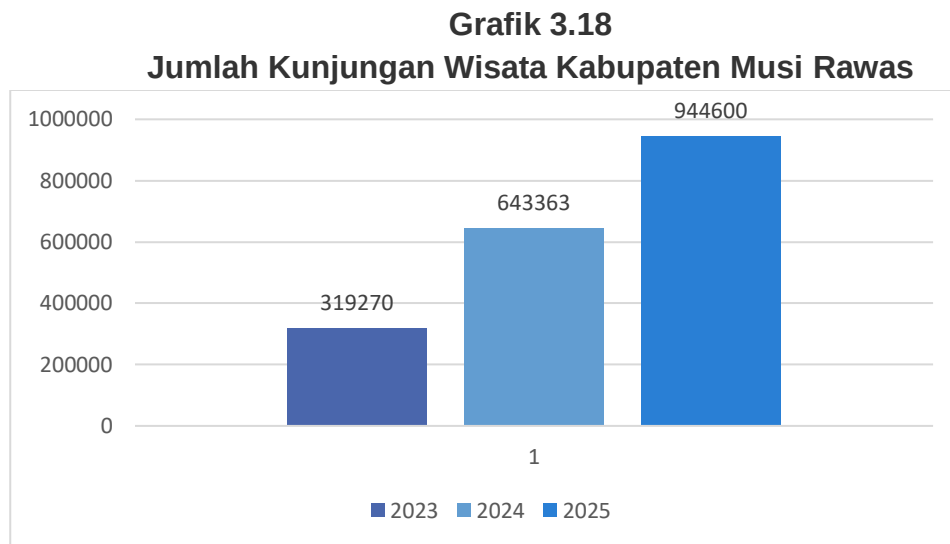
Grafik 3.17
Rasio Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman



Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan PDRB dalam sektor pariwisata terlihat dari jumlah kunjungan wisata di kabupaten Musi Rawas tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara rinci jumlah kunjungan wisata terlihat pada tabel dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Sumsel, 2026

Di Kabupaten Musi Rawas sampai saat ini belum memiliki hotel dan wisatawan menginap di hotel-hotel yang berada di Kota Lubuklinggau. Hanya ada 1 (satu) penginapan yang berada di Kecamatan Muara Beliti. Sedangkan rumah makan/ restoran jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Musi Rawas Dalam Angka. 2026

Akuntabilitas Kinerja

Program-program yang mendukung kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah:

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Program pemasaran pariwisata
3. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

14. MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH

- Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di tahun 2025 ditargetkan 2% dan terealisasi 40,44% dengan capaian 2.022%, bahkan telah jauh melampaui target akhir RPJMD. Secara rinci target, realisasi dan capaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

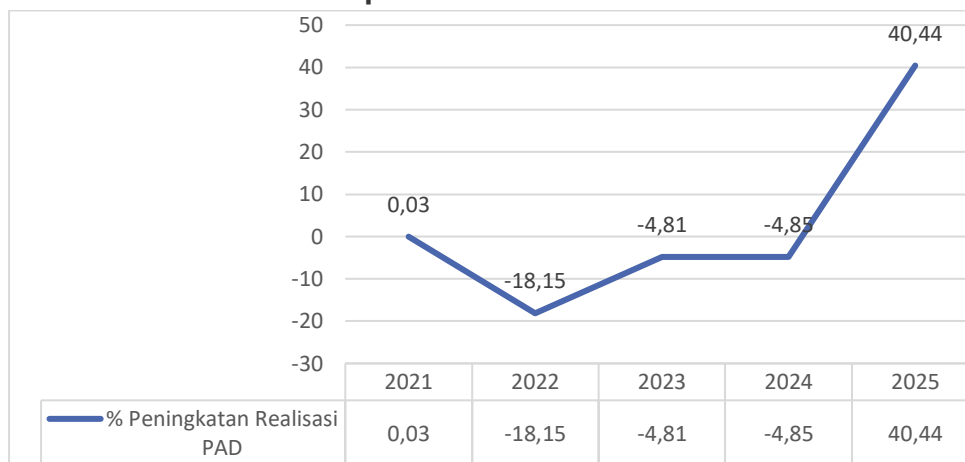
Tabel 3.34
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli Daerah	-4,85	2	40,44	2.022	2	2022
Rata-rata capaian					2.022	Sangat Tinggi	

Sumber: BPPRD Kab. Musi Rawas 2026

Perbandingan peningkatan realisasi PAD Kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPPRD Kab. Musi Rawas, 2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi ditahun 2024 bahwa ada peningkatan yang cenderung minus artinya tidak ada peningkatan PAD dari tahun sebelumnya seperti di tahun 2022, 2023 dan 2024. Namun di tahun 2025 meningkat sebesar 40,44% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang peningkatannya hanya -4,85%.

Keberhasilan peningkatan PAD sebesar 40,44% dalam satu tahun terakhir didukung oleh:

1. Optimalisasi dalam pelaksanaan tata kelola pendapatan. Hal tersebut dibuktikan dengan penyediaan anggaran operasional pengoptimalisasian pajak daerah yang berdampak positif pada peningkatan realisasi pajak daerah dari tahun sebelumnya.
2. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya sangat signifikan seperti sebagaimana tabel berikut.

Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan PAD Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.36
Penjelasan Peningkatan PAD

Jenis Pajak	Peningkatan		Keterangan
	%	Rp	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20,17%	2.837.567.114	BPPRD melalui petugas pajak memaksimalkan proses pemungutan mulai dari koordinasi sampai dengan penyampaian administrasi berupa surat tentang percepatan pemenuhan pembayaran BPHTB
PBJT Tenaga Listrik	4,55%	684.844.573	Terdapat perealisasi sisa tunggakan tahun 2021-2023 PBJT Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri dari beberapa perusahaan pertambangan migas di mana tahun 2021-2023 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk dihentikan pemungutannya, serta tahun 2024 masih dalam proses penyediaan regulasi berupa perbup yang mengatur tentang tarif PBJT Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
Pajak Air Tanah	34,68%	133.989.803	Peningkatan realisasi Pajak Air Tanah di tahun 2025 dari tahun sebelumnya disebabkan timbulnya potensi baru yang cukup besar bersumber dari satu perusahaan yang bergerak di sektor

Akuntabilitas Kinerja

			perkebunan, di mana penambahan ketetapan pada Pajak Air Tanah perbulannya rata-rata sebesar Rp 16.000.000, dimulai dari bulan Mei 2025.
--	--	--	---

3. Bahwasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat penambahan objek pajak baru berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen PKB dan Opsen BBNKB), di mana penerapan pemungutannya dimulai pada tahun 2025. sehingga realisasi yang masuk dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah sebesar Rp. 28.214.638.575 dari target Rp. 23.917.378.040 atau dengan capaian 117,96%.

Adapun program-program yang mendukung kinerja ini adalah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

15. MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT

- Pendapatan Perkapita (Juta Rp)

Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Rawas ditargetkan Rp.62,87 Juta terealisasi Rp.65,50 juta atau dengan capaian 104,18%. Target akhir RPJMD yang dicapai 85,67% secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

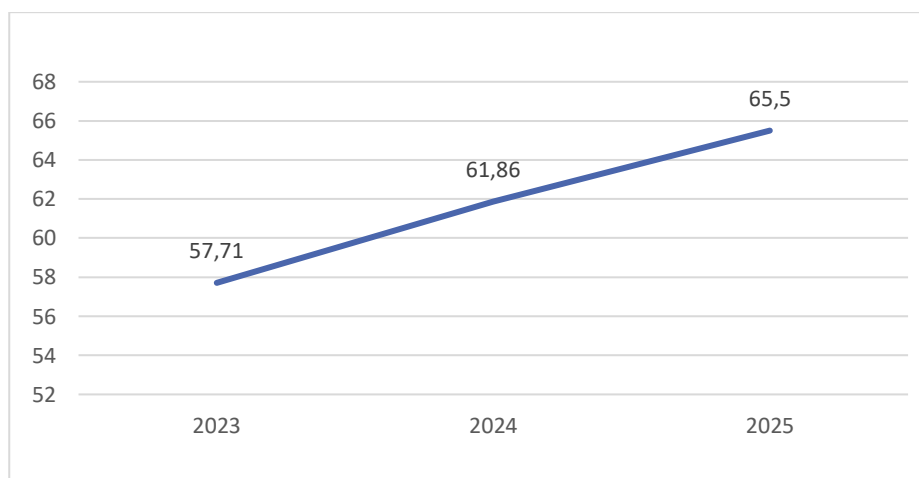
Tabel 3.37
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	61,86	62,87	65,5	104,18	76,46	85,67
Rata-rata capaian					104,18	Sangat Tinggi	

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka, 2026

Peningkatan pendapatan per kapita dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.20
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Musi Rawas



Sumber: Musi Rawas Dalam Angka, 2026

Perbandingan pendapatan Per Kapita Se-Provinsi Sumatera Selatan terlihat berada di posisi ke 5 (lima). Posisi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.38
Pendapatan Per Kapita
Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Per Kapita (Rp)
1	Muara Enim	197853
2	Musi Banyuasin	150064
3	Kota Palembang	130917
4	Lahat	71122
5	Musi Rawas	65504
6	Ogan Komering Ilir	62413
7	Ogan Komering Ulu	57539
8	Kota Prabumulih	55058
9	Musi Rawas Utara	50163
10	Penukal Abab Lematang Ilir	49703
11	Banyu Asin	48766
12	Kota Lubuklinggau	37690
13	Ogan Ilir	37001
14	Ogan Komering Ulu Timur	33145
15	Ogan Komering Ulu Selatan	29443
16	Kota Pagar Alam	27708
17	Empat Lawang	21151

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2026

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dibarengi dengan pemanfaatan yang efektif dan efisien.
2. Daya dukung infrastruktur yang baik (akses transportasi dan teknologi yang baik sehingga memperlancar aktivitas ekonomi).
3. Kebijakan ekonomi yang memihak kepada masyarakat hal ini dibuktikan dengan turunnya angka kemiskinan.
4. Pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun,

Program-program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat adalah:

1. Program pengembangan UMKM
2. Program pemberdayaan UMKM
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Akuntabilitas Kinerja

4. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
5. Program pendidikan dan latihan pengkoperasian
6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
8. Program Perencanaan Tenaga Kerja
9. Program Penempatan Tenaga Kerja
10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
11. Program Hubungan Industrial
12. Program Administrasi Pemerintahan Desa
13. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

16. MENURUNNYA KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT

- Gini Rasio

Indikator Gini Rasio ditargetkan 0,256 terealisasi 0,209 dengan capaian 118,36%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 0,244 maka capaiannya adalah 85,66%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.39
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Gini Rasio	0,285	0,256	0,209	118,36	0,244	114,34
Rata-rata Capaian					118,36	Sangat Tinggi	

Sumber: BPS Musi Rawas, 2026

Gini Rasio adalah indikator statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk secara menyeluruh di suatu wilayah, dengan skala 0 (pemerataan sempurna) hingga 1

Akuntabilitas Kinerja

(ketimpangan sempurna). Nilai mendekati 0 berarti pendapatan merata, sementara mendekati 1 berarti timpang, sehingga target setiap tahunnya harus menurun.

Gini Rasio Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi ke-3 terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk lebih baik dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan capaian ini melebihi capaian Kota Lubuklinggau yang baru mencapai 0,369 atau pada posisi ke-16. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.40
Gini Rasio Se-Provinsi Sumatera Selatan 2025

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio
1	Musi Rawas Utara	0,207
2	Musi Banyuasin	0,208
3	Musi Rawas	0,209
4	Ogan Ilir	0,219
5	Banyuasin	0,229
6	Lahat	0,235
7	Pali	0,243
8	Ogan Komering Ulu Timur	0,248
9	Ogan Komering Ilir	0,255
10	Muara Enim	0,258
11	Pagar Alam	0,278
12	Empat Lawang	0,284
13	Ogan Komering Ulu Selatan	0,291
14	Ogan Komering Ulu	0,294
15	Prabumulih	0,343
16	Lubuk Linggau	0,369
17	Palembang	0,389

Sumber; BPS Sumsel, 2026

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan gini rasio di Kabupaten Musi Rawas adalah ;

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM tahun 2024 71,21 menjadi 71,92 ditahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja

2. Penurunan Angka Kemiskinan dari tahun 2024 13,44% menjadi 12,67% ditahun 2025.
3. Pengeluaran Per Kapita riil yang tinggi Rp.11,41 Juta.
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang stabil.
5. Pertambahan jumlah penduduk yang relatif rendah

Program-program yang mendukung kinerja sasaran menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat adalah:

1. Program perlindungan dan jaminan sosial
2. Program Pemberdayaan sosial
3. Program penanganan bencana
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

17. MENINGKATNYA KUALITAS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Laju Pertambahan Penduduk

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Laju Pertambahan Penduduk merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung keberhasilan atau kegagalan sasaran meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga. Pada tahun 2025 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ditargetkan 62,8 terealisasi 62,80 dengan capaian kinerja 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 91,28%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk ditargetkan 1,06 teralisasi 0,13 dengan capaian 187,73% dan jika dibandingkan dengan akhir target RPJMD telah tercapai 143,86%. Secara rinci target, realisasi dan capaian kinerja meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.41
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Keluarga

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Pembangunan Keluarga	57,85	62,8	68,4	108,92	68,8	99,42
2	Laju pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,05	1,06	0,13	187,74	1,02	187,25
RATA-RATA CAPAIAN					148,33	Sangat Tinggi	

Sumber: DPPKB Kab. Musi Rawas, 2026

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) adalah Ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Dari tabel di atas ada peningkatan Ibangga dari 57,85 menjadi 62,80 dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurun dari 1,05 tahun 2024 menjadi 0,13 tahun 2025. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
2. Kedudukan organisasi dan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cukup strategis dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. Distribusi alat dan obat kontrasepsi berjalan lancar;
4. Didukung oleh pelayanan KB mobile (GALCITAS dan Momentum);
5. Peningkatan KIE dan Konseling KB oleh penyuluh KB/PL KB dan kader KB;
6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Ibangga;

Akuntabilitas Kinerja

Walaupun demikian masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera diantaranya:

1. Tingginya disparitas prevalensi kontrasepsi (CPR) antar wilayah;
2. Rendahnya peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan;
4. Rendahnya pemahaman remaja tentang usia ideal menikah.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan yaitu:

1. Melakukan pembinaan secara kontinyu pada kelompok BKL, BKB dan UPPKA;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
3. Membentuk pengelola khusus laporan pernikahan dini tingkat kabupaten dan kecamatan;
4. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan avokasi dan KIE bangga kencana.

Program-program yang mendukung kinerja sasaran meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak

18. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

- Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan diukur dengan Indikator Indeks Ketahanan Pangan. Tahun 2025 ditargetkan 77,84 terealisasi 82,33

Akuntabilitas Kinerja

dengan capaian 105,77% atau dengan kategori **sangat tinggi**. Perbandingan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 104,56%.

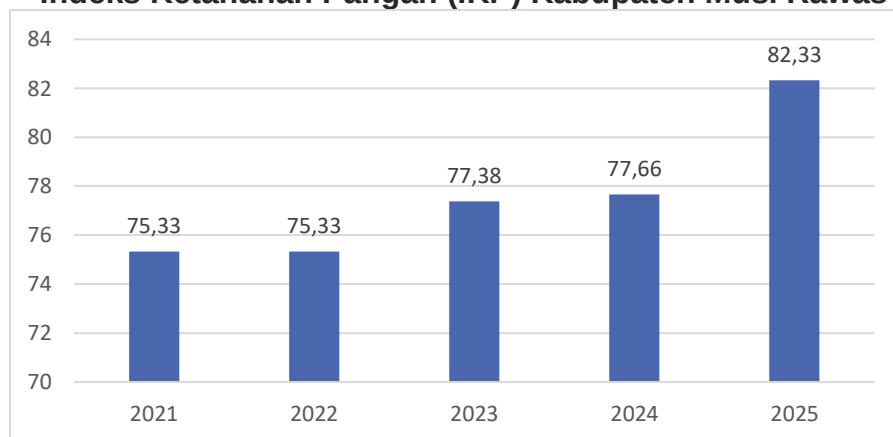
Tabel 3.42
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Ketahanan Pangan	77,66	77,84	82,33	105,77	78,74	104,56
Rata-rata capaian					105,77	Sangat Tinggi	

Sumber: DKP Kab. Musi Rawas, 2026

Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Musi Rawas dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 3.21
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Musi Rawas



Sumber: DKP Kab. Musi Rawas, 2026

Untuk mencapai ketahanan pangan yang mantab dan berkelanjutan ada 4 (empat) komponen pokok yang harus diperhatikan yaitu:

1. ketersediaan pangan yang cukup dan merata;
2. keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien;
3. konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman;
4. keamanan pangan yang baik.

Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan dihitung menggunakan indikator skor PPH Ketersediaan dan skor PPH Konsumsi. Realisasi skor PPH Ketersediaan sebesar 96,80 dan skor PPH Konsumsi sebesar 93,71. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumber daya lokal dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Keempat komponen diatas diwujudkan sampai tingkat dengan:

1. Meningkatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam yang ada, perlu dilakukan pengelolaa yang baik;
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan teknologi, sfesifikasi lokasi dan ramah lingkungan;
3. Memberdayakan masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, aman dan halal untuk kesehatan;
4. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah;
5. Memantapkan pasar pangan yang bijaksana;
6. Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pangan pokok.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas telah melakukan peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan dengan indikator score PPH Ketersediaan dan score PPH konsumsi. Secara rinci hasil capaian tersebut tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.43
Realisasi Indikator Score PPH Ketersedian dan Konsumsi

Indikator	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Score PPH Ketersediaan	76,5	92,27	95,50	96,8
Score PPH Konsumsi	93,4	93,06	95,42	93,71

Sumber: DKP Kab. Musi Rawas, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Kapabilitas kelompok usaha pangan belum memadai;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan alternatif;
3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi;
4. Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya konsumsi menu dengan pola pangan yang benar;

Solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi atau bimtek terhadap kelompok usaha pangan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui promosi pangan alternatif dan pola pangan yang benar.

Program-program yang mendukung sasaran kinerja meningkatnya ketahanan pangan adalah:

1. Program pengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Program penanganan kerawanan pangan
4. Program pengawasan keamanan pangan

19. MENINGKATNYA KEAMANAN DAERAH DAN STABILITAS DEMOKRASI

- Angka Kriminalitas

Indeks kriminalitas merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kejadian tindak kejahatan di suatu wilayah, dengan nilai yang lebih tinggi mencerminkan frekuensi kejadian kriminal yang lebih besar. Angka Kriminalitas diharapkan turun menjadi 66,64 ditahun 2025 terealisasi 58,64 dengan capaian 112%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 96,17%. Secara rinci target, realisasi dan

Akuntabilitas Kinerja

capaian sasaran meningkatnya keamanan dan stabilitas demokrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.44
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran
Meningkatnya Keamanan Daerah dan Stabilitas Demokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Sampai Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Angka Kriminalitas	68,67	66,64	58,64	112	56,48	96,18
Rata-rata capaian					112	Sangat Tinggi	

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas, 2026

Angka kriminalitas 58,64 berarti bahwa jumlah kejahatan di Kabupaten Musi Rawas dalam 100.000 penduduk dalam 1 (satu) tahun terdapat 252 kasus kejahatan atau rata-rata per kecamatan berjumlah 18 kasus pertahun. Secara rinci perbandingan jumlah kasus kejahatan dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.45
Angka kriminalitas dan Jumlah Kasus Kejahatan
Kabupaten Musi Rawas

No	Uraian	2024	2025
1.	Angka Kriminalitas	68,67	58,64
2.	Jumlah Kasus	294	252

Sumber; Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas, 2026

Keberhasilan dalam menurunkan angka kriminalitas didukung oleh:

1. Melaksanakan koordinasi melalui tim deteksi dini untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, bencana alam atau konflik sosial umat beragama dan Forkopimda
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai isu-isu ditingkat masyarakat melalui intelijen
3. Menyusun laporan dan informasi guna disampaikan kepada Bupati Musi Rawas

Akuntabilitas Kinerja

4. Memberikan masukan kepada Bupati Musi Rawas dalam rangka kewaspadaan dini
5. Membantu menciptakan ketentraman, ketertiban dan stabilitas keamanan masyarakat.

Program-program yang mendukung menurunnya angka kriminalitas adalah:

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum;
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Di dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2026 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) . Capaian indikator kinerja utama tahun 2025 secara rinci tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	INDIKATOR	REALISASI 2024	2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN SAMPAI AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	5,3	4,59	86,60	7,00	65,57
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,21	71,35	71,92	100,80	76,59	93,90
3	Tingkat Kemiskinan	13,44	11,5	12,67	90,00	9,19	62,13
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,44	71,14	76,88	108,07	72,40	106,19
5	Pendapatan Per Kapita	61,86	62,87	65,5	104,18	76,46	85,67

Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR	REALISASI 2024	2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN SAMPAI AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
6	Gini Ratio	0,285	0,256	0,209	118,36	0,244	114,34
7	Indeks Reformasi Birokrasi	75,77	76,24	75,77*	99,38	78,59	96,41

*) data tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.47

ALASAN PENDUKUNG PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN

SASARAN		PROGRAM	ALASAN PENDUKUNG PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN
Sasaran	Indikator Sasaran		
1	2	3	4
1. Meningkatnya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks RB	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah 4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan 6. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 4. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah 5. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa 6. Meningkatnya kualitas layanan public

Akuntabilitas Kinerja

			7. Program Pendaftaran Penduduk 8. Program Pencatatan Sipil 9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Program Pengelolaan Arsip 11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 12. Program Kepegawaian Daerah 13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 14. Program Riset dan Inovasi daerah	7. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 8. Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 9. Meningkatnya tata kelola kearsipan 10. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah 11. Meningkatnya Kualitas kebijakan daerah 12. Meningkatnya kualitas kebijakan Daerah 13. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik 14. Meningkatnya tata kelola dan kualitas SDM Aparatur 15. Meningkatnya Pemenuhan Standar Layanan Publik
2	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah; 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	1. Meningkatnya transformasi digital 2. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi dalam layanan pemerintah 3. Meningkatnya keamanan informasi digital

Akuntabilitas Kinerja

3	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan 3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui pembudayaan olahraga
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengendalian Izin Pendidikan 5. Program Pengembangan Kebudayaan 6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Meningkatnya literasi Masyarakat 2. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan 3. Meningkatnya kualitas pendidikan 4. Meningkatnya kelestarian nilai kearifan lokal dan kebudayaan 5. Meningkatnya akses pendidikan bagi pemuda
5	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	1. Program penyelenggaraan jalan 2. Program pengembangan jasa konstruksi 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, dan kompetensi tenaga konstruksi 2. Meningkatnya kelancaran dan keamanan transportasi

Akuntabilitas Kinerja

6	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar, perumahan dan sumber daya air	Indeks Infrastruktur Dasar	1. Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 4. Program pengembangan perumahan 5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) 6. Program Kawasan Permukiman 7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 9. Program penataan bangunan gedung 10. Program penataan bangunan dan lingkungannya	1. Meningkatnya akses sanitasi layak 2. Meningkatnya akses air minum layak 3. Meningkatnya kualitas rumah layak huni 4. Meningkatnya kualitas penanganan kawasan kumuh 5. Meningkatnya akses listrik 6. Meningkatnya pengelolaan sungai untuk pengendalian daya rusak air 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan irigasi 8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas gedung negara beserta sarana penunjang
		Indeks Sumber Daya Air		
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program pengelolaan persampahan	1. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup 2. Meningkatnya fungsi pemulihan lingkungan hidup

Akuntabilitas Kinerja

		Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)	3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3. Meningkatnya Kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3
8	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	1. Terpenuhinya regulasi penataan ruang sesuai Peraturan Perundangundangan 2. Terkendalinya pemanfaatan ruang 3. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan 4. Meningkatnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
9	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Program penanggulangan bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana 3. Meningkatnya kualitas penanganan pasca bencana
10	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (Persen)	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana 3. Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner 4. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan 2. Meningkatnya produksi perkebunan 3. Meningkatnya produksi perikanan

Akuntabilitas Kinerja

			5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program pengawasan sumber daya kelautan perikanan 10. Program perizinan usaha pertanian	
11	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	1. Program perencanaan dan Pembangunan industry 2. Program pengendalian izin usaha industri 3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional 4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 5. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 6. Program pengembangan ekspor 7. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 8. Program Perizinan pendaftaran perusahaan 9. Program standarisasi dan perlindungan konsumen	1. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah 2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan

Akuntabilitas Kinerja

12	Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Nilai Invetasi (Rp)	1. Program pelayanan penanaman modal 2. Program pengembangan iklim penanaman modal 3. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 4. Program Promosi penanaman modal 5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Meningkatnya dana pihak ketiga 2. Meningkatnya pelaku usaha 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan 2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya pajak daerah 2. Meningkatnya retribusi daerah

Akuntabilitas Kinerja

15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	1. Program pengembangan UMKM 2. Program pemberdayaan UMKM 3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 4. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 5. Program pendidikan dan latihan pengkoperasian 6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Perencanaan Tenaga Kerja 9. Program Penempatan Tenaga Kerja 10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 11. Program Hubungan Industrial 12. Program Administrasi Pemerintahan Desa 13. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.	1. Meningkatnya kemandirian usaha masyarakat; - Meningkatnya koperasi berkualitas - Meningkatnya UMKM yang produktif - Meningkatnya usaha kecil dan menengah non pertanian - Meningkatnya wirausaha muda - Meningkatnya kualitas BUMD 2. Menurunnya tingkat pengangguran - Terciptanya lapangan pekerjaan - Meningkatnya kualitas angkatan kerja - Meningkatnya perlindungan dan keselamatan pekerja - Meningkatnya partisipasi pekerja perempuan 3. Meningkatnya kemandirian desa - Meningkatnya kualitas Bumdes - Berkembangnya usaha ekonomi kreatif (UEP) Masyarakat; - Meningkatnya status desa kawasan transmigrasi
----	------------------------------------	--------------------------------	---	---

Akuntabilitas Kinerja

16	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Gini Rasio	1. Program perlindungan dan jaminan sosial 2. Program Pemberdayaan sosial 3. Program penanganan bencana 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial - Meningkatnya jaminan kesehatan - Meningkatnya jaminan social ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan - Meningkatnya layanan sosial untuk musibah dan bencana 2. Meningkatnya pelayanan PPKs - Meningkatnya kualitas penanganan PKs - Meningkatnya pemberdayaan sosial - Meningkatnya kualitas bantuan social
17	Meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga Laju pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Pengendalian Penduduk 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 4. Program Perlindungan Perempuan 5. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan 2. Terkendalinya angka kelahiran 3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Akuntabilitas Kinerja

18	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	1. Program pengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 3. Program penanganan kerawanan pangan 4. Program pengawasan keamanan pangan	1. Meningkatnya diversifikasi pangan 2. Terkendalinya standar harga kebutuhan pangan daerah 3. Meningkatnya ketersediaan pangan
19	Meningkatnya keamanan daerah dan stabilitas demokrasi	Angka Kriminalitas	1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum; 3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 2. Terciptanya keamanan dan ketertiban 3. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **2.145.785.202.807,80** yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Secara rinci pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Rawas tersaji pada tabel dibawah ini:

Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.48
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 *)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	bertambah / (berkurang)	
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.219.677.011.947,00	2.026.739.975.862,50	192.937.036.084,50	91%
	Pendapatan Asli Daerah	209.095.588.120,00	176.793.780.559,50	32.301.777.560,50	85%
	Pendapatan Transfer	2.010.581.453.827,00	1.849.946.195.303,00	160.635.258.524,00	92%
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	0%
2	BELANJA	2.260.695.659.553,48	1.957.127.132.146,17	303.568.527.407,31	87%
	Belanja Operasi	1.334.831.221.228,51	1.207.610.912.083,17	127.220.309.145,34	90%
	Belanja Modal	612.952.834.522,97	455.033.158.347,00	157.919.676.175,97	74%
	Belanja Tidak Terduga	3.478.412.352,00	-	3.478.412.352,00	0%
	Belanja Transfer	309.433.191.450,00	294.483.061.716,00	14.950.129.734,00	95%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	(1.173.570,00)	100%
	Penerimaan Pembiayaan	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	(1.173.570,00)	100%
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	0%

*) unaudited

Sumber: BPKAD Kab.Musi Rawas, 2026

Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.49
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Realisasi Anggaran

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1.	Indeks RB	76,24	75,77	99,38	99,38	345.813.892.352	320.832.415.492	92,78
2	Indeks SPBE	3,11	3,25	104,5	104,50	6.386.285.550	6.015.743.542	94,20
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,2	74,45	100,34	100,34	99.445.194.425	92.963.832.153	93,48
4	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,58	7,61	100,4	100,85	115.395.668.504	110.686.726.422	95,92
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,27	12,43	101,3				
5	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	94,08	82,95	88,17	88,17	427.405.096.880	310.271.485.359	72,59
6	Indeks Infrastruktur Dasar	99,37	93,38	93,97	98,16	103.324.284.162	93.211.780.479	90,21
7	Indeks Sumber Daya Air	49,85	51,02	102,35				
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,14	76,88	108,07	120,88	5.050.915.670	4.719.883.866	93,45
9	Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 ekuivalen)	654.108,15	874.480	133,69				

Akuntabilitas Kinerja

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
10	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	92,26	92,25	99,99	99,99	1.813.403.900	1.717.141.850	94,69
11	Indeks Ketahanan Daerah	0,4	0,27	67,5	67,50	851.017.524	818.282.898	96,15
12	PDRB Sektor Pertanian (persen)	29,96	34,93	116,59	116,59	10.953.268.965	9.942.108.093	90,77
13	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	14,97	12,87	85,97	212,23	1.172.588.689	1.090.959.916	93,04
14	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	2,52	8,53	338,49				
15	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	850 M	1.307 M	153,76	153,76	354.450.000	354.188.608	99,93
16	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makanan dan minuman	0,38	0,32	84,21	84,21	131.801.100	128.691.970	97,64
17	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah	2	40,44	2.022	2022	316.577.086.994	297.730.528.137	94,05
18	Pendapatan Perkapita	62,87	65,5	104,18	104,18	6.504.129.435	5.781.438.560	88,89
19	Gini Rasio	0,256	0,209	118,36	118,36	92.029.870.297	88.361.025.764	96,01
20	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,8	68,4	108,92	148,33	4.462.094.775	3.923.099.143	87,92
21	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,06	0,13	187,74				

Akuntabilitas Kinerja

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
22	Indeks Ketahanan Pangan	77,84	82,33	105,77	105,77	786.630.724	723.561.280	91,98
23	Angka Kriminalitas	66,64	58,64	112	112	3.742.981.814	3.687.387.099	98,51

D. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam pembiayaan program-program yang telah direncanakan. Sasaran kinerja yang telah mencapai $\geq 100\%$ namun anggaran yang digunakan masih tersisa maka program-program tersebut telah efisien. Ada beberapa sasaran kinerja yang capaiannya diatas 100% yaitu:

1. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan;
3. Meningkatnya Derajat Pendidikan;
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian;
6. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan;
7. Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Musi Rawas;

Akuntabilitas Kinerja

8. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat;
10. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat;
11. Meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga berencana;
12. Meningkatnya ketahanan pangan;
13. Meningkatnya keamanan daerah dan stabilitas demokrasi.

Secara rinci efesiensi sumber daya keuangan tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.50
Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

NO	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB	76,24	75,77	99,38	99,38	345.813.892.352	320.832.415.492	92,78	-
2	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	3,11	3,25	104,5	104,50	6.386.285.550	6.015.743.542	94,20	5,80
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,2	74,45	100,34	100,34	99.445.194.425	92.963.832.153	93,48	6,52

Akuntabilitas Kinerja

NO	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,58	7,61	100,4	100,85	115.395.668.504	110.686.726.422	95,92	4,08
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,27	12,43	101,3					
5	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	94,08	82,95	88,17	88,17	427.405.096.880	310.271.485.359	72,59	-
6	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur dasar, perumahan dan	Indeks Infrastruktur Dasar	99,37	93,38	93,97	98,16	103.324.284.162	93.211.780.479	90,21	-
		Indeks Sumber Daya Air	49,85	51,02	102,35					
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,14	76,88	108,07	120,88	5.050.915.670	4.719.883.866	93,45	6,55
		Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 ekuivalen)	654.108,15	874.480	133,69					
8	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	92,26	92,25	99,99	99,99	1.813.403.900	1.717.141.850	94,69	-
9	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,4	0,27	67,5	67,50	851.017.524	818.282.898	96,15	-
10	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	PDRB Sektor Pertanian (persen)	29,96	34,93	116,59	116,59	10.953.268.965	9.942.108.093	90,77	9,23

Akuntabilitas Kinerja

NO	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
11	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	14,97	12,87	85,97	212,23	1.172.588.689	1.090.959.916	93,04	6,96
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	2,52	8,53	338,49					
12	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	850 M	1.307 M	153,76	153,76	354.450.000	354.188.608	99,93	0,07
13	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makanan dan minuman	0,38	0,32	84,21	84,21	131.801.100	128.691.970	97,64	-
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah	2	40,44	2.022	2022	316.577.086.994	297.730.528.137	94,05	5,95
15	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	62,87	65,5	104,18	104,18	6.504.129.435	5.781.438.560	88,89	11,11
16	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Gini Rasio	0,256	0,209	118,36	118,36	92.029.870.297	88.361.025.764	96,01	3,99

Akuntabilitas Kinerja

NO	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
17	Meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,8	68,4	108,92	148,33	4.462.094.775	3.923.099.143	87,92	12,08
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,06	0,13	187,74					
18	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,84	82,33	105,77	105,77	786.630.724	723.561.280	91,98	8,02
19	Meningkatnya keamanan daerah dan stabilitas demokrasi	Angka Kriminalitas	66,64	58,64	112	112	3.742.981.814	3.687.387.099	98,51	1,49

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kendala dalam mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan/revisi tahun 2025. Revisi terhadap perjanjian kinerja tahun 2025 dikarenakan adanya masa transisi pemerintahan dari periode tahun sebelumnya. Kebijakan perencanaan ditandai dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Walaupun ada 1 (satu) indikator yang capaiannya hanya 67,50% yaitu Indeks Ketahanan Daerah, tetapi ada 1 (satu) indikator yang capaiannya jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli daerah yang mencapai 2.002%. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil karena realisasi dari 24 indikator kinerja sasaran strategis terdapat 17 (tujuh belas) indikator dengan capaian diatas 100% keatas, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 17 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 7 target.

Jika dilihat berdasarkan sasaran strategis terdapat 13 sasaran strategis dengan capaian diatas 100% dan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 6 sasaran dari total seluruh sasaran kinerja sebanyak 19 sasaran.

Dalam mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti efisiensi anggaran, penerbitan regulasi, pelaksanaan program-program unggulan dan prioritas serta koordinasi kelembaga/instansi terkait guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efficient.

Program-program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja menimbulkan realisasi anggaran dalam APBDP tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. **1.861.995.911.246,17** (*unaudited*) dari pagu anggaran Rp. **2.260.695.659.553,48**.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya indikator-indikator sasaran akan menjadi focus perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Upaya koordinasi dengan instansi terkait, efisiensi dan efektifitas kegiatan dan anggaran yang bersifat prioritas dan berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

NO	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB	76,24	75,77*	99,38	Kemenpan RB
2	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	3,11	3,25	104,5	Kemendigi
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,2	74,45	100,34	BPS
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,58	7,61	100,4	BPS
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,27	12,43	101,3	BPS
5	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	94,08	82,95	88,17	DPU BM
6	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur dasar, perumahan dan	Indeks Infrastruktur Dasar	99,37	93,38	93,97	DPUCKTRP
		Indeks Sumber Daya Air	49,85	51,02	102,35	DPUCKTRP
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,14	76,88	108,07	DLH
		Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 ekuivalen)	654.108,15	874.480	133,69	DLH
8	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	92,26	92,25	99,99	DPUCKTRP
9	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,4	0,27	67,5	BNPB
10	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (persen)	29,96	34,93	116,59	BPS
11	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	14,97	12,87	85,97	BPS
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	2,52	8,53	338,49	BPS

NO	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
12	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	850 M	1,307 M	153,76	DPMPTSP
13	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makanan dan minuman	0,38	0,32	84,21	BPS
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah	2	40,44	2.022	BPPRD
15	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	62,87	65,5	104,18	BPS
16	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Gini Rasio	0,256	0,209	118,36	BPS
17	Meningkatnya kualitas kependudukan dan keluarga berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,8	68,4	108,91	DPPKB
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,06	0,13	187,73	DPPKB
18	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,84	82,33	105,77	DKP
19	Meningkatnya keamanan daerah dan stabilitas demokrasi	Angka Kriminalitas	66,64	58,64	112,00	BaKesbangpol



Muara Beliti, 30 Maret 2026
BUPATI MUSI RAWAS,

Ratna Machmud
RATNA MACHMUD

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	4,59	86,60	BPS Kab. Mura
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,35	71,92	100,80	BPS Kab. Mura
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,5	12,67	90,00	BPS Kab. Mura
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,14	76,88	108,07	DLH Kab. Mura
5	Pendapatan Per Kapita	Juta (Rupiah)	62,87	65,5	104,18	BPS Kab. Mura
6	Gini Ratio	Angka	0,256	0,209	118,36	BPS Kab. Mura
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,24	75,77*	99,38	KemenpanRB

* Data 2024 (LHE 2025 belum terbit)



Muara Beliti, 30 Maret 2026
BUPATI MUSI RAWAS,

Ratna Machmud
RATNA MACHMUD